

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM REGIONAL DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH



Disusun Oleh:

**BAYYIN GAFARA
NIM. 160604085**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Bayyin Gafara
NIM : 160604085
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli dan atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan penipulasian dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Bayyin Gafara)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Bayyin Gafara
NIM. 160604085

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si
NIDN.0126037801

Pembimbing I



Tajul Ula, SE., M.Si
NIDN.1308129301

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP.197204281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimu Regional,
dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh**

Bayyin Gafara
NIM. 160604085

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Juni 2022
10 Jumadil Akhir 1443 H

Ketua,

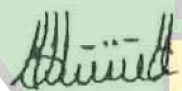
Sekretaris,


Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si
NIDN.0126037801


Tajul Ula, SE., M.Si
NIDN.1308129301

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Maimun, SE., Ak.M.Si
NIP. 197009171997031002


A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. H. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

JL. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, FAX. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Bayyin Gafara
NIM : 160604085
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Email :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

(*tulis jenis karya ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selam tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 30 April 2021

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Bayyin Gafara
NIM. 160604085

Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si
NIDN. 0126037801

Tajul Ula, SE., M.Si
NIDN. 1308129301

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat, karunia, serta rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini, yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh”

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw, keluarga serta para sahabat beliau sekalian. Penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah di berikan demi kesempurnaan skripsi ini, kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku ketua program studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, SE., MM. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Akmal Riza, S.E., M.Si selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Dr. Isthafan Najmi S.E., M.Si sebagai Pembimbing I dan Tajul Ula, S.E., M.Si Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Ervi Yenni, S.E., M.Si. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi. Dan Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya proposal skripsi ini.
6. Terima kasih untuk kolonel inf (purn) Muhammad Hadis, selaku om yang telah memberikan nasehat serta didikannya.
7. Terima kasih untuk ibunda Sasmita, S.Pd.I yang telah mengandung, membesarkan dan mendidik saya sampai saat ini, sungguh tidak dapat tergantikan jasmu ibu.
8. Terima kasih untuk Leda inf Andi Oscar Lubis, selaku abang kandung saya yang telah mendidik dan banyak mengajarkan kedisiplinan pada saya.
9. Terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam

menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalah pahaman dalam penulisan proposal skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Banda Aceh, 1 Oktober 2022



Bayyin Gafara



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	AR - D A N I R Y			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

<i>raudah al-atfal/raudatul atfal</i> :	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-madinah al-munawwarah/</i>	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>al-madinatul munawwarah</i>	
<i>talhah</i> :	طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Bayyin Gafara
NIM : 160604085
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu
Ekonomi
Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Upah Minimum Regional Dan Dana
Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan Di
Provinsi Aceh
Tanggal Sidang : 06 JUNI 2022
Tebal :
Pembimbing I : Dr. Isthafan Najmi S.E., M.Si
Pembimbing II : Tajul Ula, S.E., M.Si

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besarkah pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan dana otonomi khusus terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Sampel penelitian adalah sebanyak 299 sampel. Berdasarkan penelitian ini data yang digunakan adalah data yaitu pertumbuhan ekonomi, Upah minimum regional, serta dana otonomi khusus pada tahun 2008-2020 serta data *cross section* yang terdiri dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui nilai R^2 dalam model tersebut berjumlah 0,660725 menunjukkan bahwa 66,07% variabel independen yang digunakan pada penelitian ini dapat menjelaskan model, namun 33,93% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) memiliki koefisien sebesar 0,042339. Variabel upah minimum regional (X_2) memiliki koefisien -2,38 dan Variabel dana otonomi khusus (X_3) memiliki nilai koefisien 2,51.

Kata kunci : ***Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Dana Otonomi Khusus dan Kemiskinan***

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGATAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GRAFIK	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Sistematika Penulisan	16
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Kemiskinan	18
2.1.1 Penyebab Kemiskinan	19
2.1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan	20
2.1.3 Indikator Kemiskinan	21
2.2. Pertumbuhan Ekonomi	22
2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	24
2.2.2 Faktor-faktor yang menentukan Pertumbuhan Ekonomi	26
2.2.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi	27
2.3. Upah Minimum Regional	28
2.2.4 Teori Upah	28
2.4. Dana Otonomi Khusus	30
2.4.1 Sejarah Otonomi Khusus	30
2.4.2 Pengertian Otonomi Khusus	32
2.4.3 Manfaat Otonomi Khusus	32
2.4.4 Daerah yang Diberikan Otonomi Khusus	33

2.4.5 Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus.....	33
2.4.6 Implementasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus..	34
2.5. Penelitian Sebelumnya	35
2.6. Hubungan Antara Variabel.....	39
2.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan	39
2.6.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan	41
2.6.3 Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan	42
2.7. Hipotesis Penelitian	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian	45
3.3. Jenis dan Sumber Data	46
3.4. Sampel	46
3.5. Operasional Variabel	47
3.6. Model Penelitian.....	48
3.7. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASA

4.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh	59
4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	60
4.1.2 Upah Minimum Regional	62
4.1.3 Dana Otonomi Khusus	63
4.1.4 Tingkat Kemiskinan.....	65
4.2. Estimasi Data Panel	67
4.2.1 Hasil Chow Test.....	68
4.2.2 Hasil Hausman Test	69
4.3. Hasil Uji Goodnes of Fit	70
4.4. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu	72
4.5. Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	74

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	85
-----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	27
Tabel 4.1 Hasil Chow Test	39
Tabel 4.2 Hasil Hausman Test.....	39
Tabel 4.3 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	40



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Angka Penduduk Miskin di Aceh (2010-2020)	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Terendah di Sumatera	3
Grafik 1.3 Angka Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (2012-2020)	4
Grafik 1.4 Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi (2015-2018)	5
Grafik 1.5 Angka Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi Aceh (2000-2016).....	6
Grafik 1.6 Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh (2008-2018).....	7
Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 2008-2020..	34
Grafik 4.2 Upah Minimum Provinsi Aceh 2008-2020	35
Grafik 4.3 Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh 2008-2020..	36
Grafik 4.4 Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh 2008-2020.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	24
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

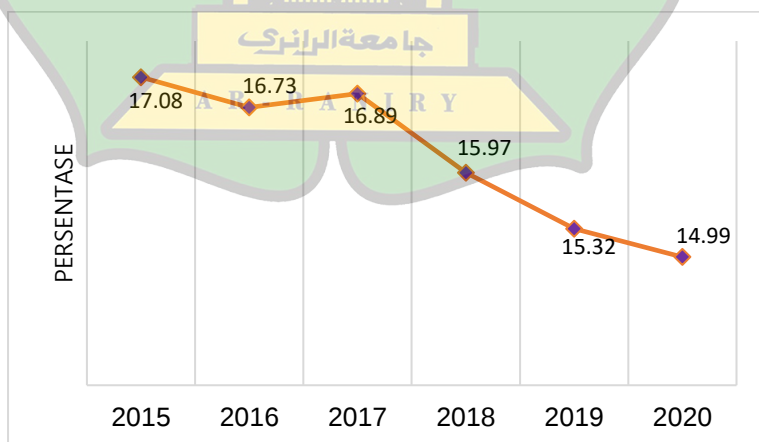
Zaman globalisasi saat ini berdampak pada isu ekonomi di belahan dunia yang semakin ambigu, akibat tidak menentunya berbagai faktor dari variabel ekonomi itu sendiri maupun faktor dari variabel non-ekonomi lainnya. Perkembangan globalisasi diharapkan berdampak baik terhadap pembangunan perekonomian dan tatanan struktural sosial ekonomi suatu masyarakat, tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya peran negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan perkembangan rakyat melalui tingkat kualitas hidup masyarakatnya. Perkembangan rakyat di Indonesia identik dengan rendahnya angka kemiskinan, oleh karena itu hal yang lebih efektif dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrument pembangunan (Disu & Fauzi 2016).

Problematika kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang sering dialami oleh setiap negara, dimana peristiwa ini telah muncul sejak zaman dahulu awal keberadaan manusia hingga kini masih menjadi masalah utama di setiap negara manapun terutama negara berkembang (Novriansyah, 2018). Kemiskinan merupakan suatu isu mendunia yang dapat menghambat kesejahteraan dan kemajuan umat manusia (Pribadi, 2015). Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bersifat umum.

Kemiskinan dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan suatu negara. Secara umum kemiskinan muncul dapat terlihat dari perubahan pola kerja dari sektor agraris ke sektor industri yang mengakibatkan adanya spesialisasi pekerjaan, sehingga menuntut kecakapan hidup (*life skill*) yang harus dimiliki setiap individu dalam bersaing mendapatkan pekerjaan. Kemiskinan adalah suatu masalah mendasar dimana kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan paling penting, selain itu kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi secara mendunia dimana seluruh negara di dunia mengalami masalah yang sama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tahun 2018, kemiskinan pada provinsi Aceh mengalami perubahan dari tahun ke tahunnya. Berikut data tingkat kemiskinan di provinsi aceh pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut:

Grafik 1.1
Angka Penduduk Miskin di Aceh Tahun 2015- 2020
(Persentase)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021

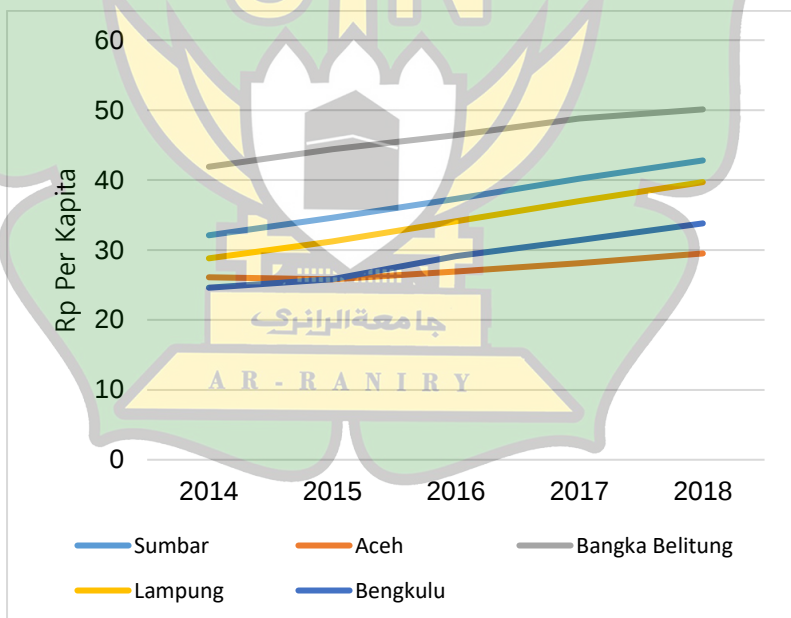
Berdasarkan grafik 1.1, selama enam tahun terakhir, kemiskinan di provinsi Aceh cenderung meningkat dan menurun. Di tahun 2015 tingkat masyarakat miskin di Aceh sebesar 17,08% yaitu sebanyak 851,59 ribu jiwa, sedangkan di tahun 2016 kemiskinan provinsi Aceh mengalami penurunan yaitu 16,73% yaitu sebanyak 848,44 ribu jiwa. Tahun selanjutnya yaitu 2017 tingkat kemiskinan provinsi Aceh meningkat sebesar 16,89% yaitu sebanyak 872,61 ribu jiwa. Tahun selanjutnya yaitu 2018, 2019, dan 2020 tingkat kemiskinan mengalami penurunan secara berturut-turut yaitu sebesar 15,97%, 15,32%, dan 14,99% yaitu sebanyak 839,49 ribu jiwa, 819,44 ribu jiwa, dan tahun 2020 sebanyak 814,91 ribu jiwa.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengatasi fenomena buruk kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomilah yang dibutuhkan guna mengatasi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menjadi tindakan yang sangat berarti untuk menurunkan angka kemiskinan pada lingkungan masyarakat, salah satunya dengan pemerataan pendapatan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa salah satu indeks keberhasilan dalam pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran guna menekan tingkat kemiskinan. Hal ini akan diikuti dengan

besar atau kecilnya upah. Apabila upah naik maka besarnya pengangguran akan berkurang, sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan (Novriansyah, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh mengalami perubahan naik dan turun dari tahun ke tahunnya seperti terlihat pada grafik 2.1 sebagai berikut:

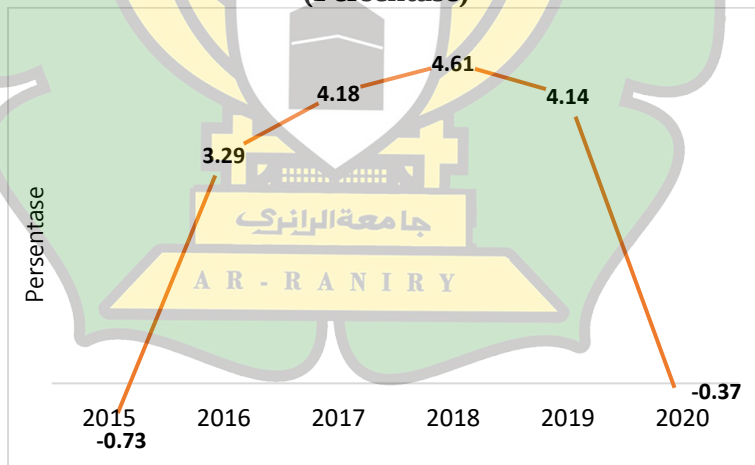
Grafik 1.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Terendah di Sumatera
(2014-2018)
(Rp Per Kapita)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan sebagai alat mengukur sejauhmana kemajuan ekonomi, PDRB diukur melalui hasil pembangunan nasional per kapita yang diperoleh. Hasil data BPS (2021) diperoleh nilai PDRB tahun 2018 5,07% meningkat menjadi Rp 29,52 juta dibanding tahun sebelumnya. Namun, nilai tersebut merupakan nilai terendah dibanding provinsi lainnya di Pulau Sumatera. PDRB per kapita Aceh selalu menjadi yang terendah sejak 2015. Provinsi dengan PDBRB per kapita terendah berikutnya adalah Bengkulu, yaitu sebesar Rp 33,82 juta. Berikut dapat kita lihat tabel pertumbuhan ekonomi provinsi aceh 2015-2020.

Grafik 1.3
Angka Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (2015- 2020)
(Persentase)



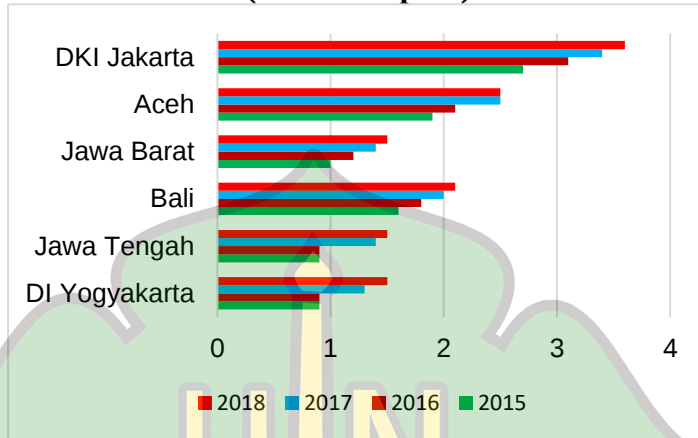
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021

Berdasarkan tabel 1.3, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 berjumlah sebesar -0,72% dan mengalami peningkatan di

tahun 2016 dan 2017 sebesar 3,29%, dan 4,18%, hingga tahun 2018 meningkat sebesar 4,61%, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 4,14% dan 2020 menurun -0,37%.

Upah minimum regional merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Kuswantoro dan Dewi (2016) menjelaskan bahwa upah minimum adalah upaya yang dilakukan untuk mengangkat derajat masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama penduduk miskin. Upah minimum merupakan patokan terendah yang digunakan suatu entitas untuk menyerahkan gaji kepada pegawai atau karyawan di dalam suatu entitas. Upah minimum juga sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga ahli, dengan adanya upah yang sesuai atau memadai masyarakat lebih bisa bertahan hidup menggunakan bayaran yang ia terima setelah bekerja. Pekerja atau sering dikenal dengan buruh, pengusaha dan pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Namun, pemerintah lah yang sangat berpengaruh terhadap penetapan Kebijakan Upah Minimum Provinsi. Berikut tabel kenaikan upah minimum provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk perkembangan tingkat upah minimum pada provinsi Aceh, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, upah minimum provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada grafik 1.4 berikut:

Grafik 1.4
Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi 2015-2018
(Jutaan Rupiah)

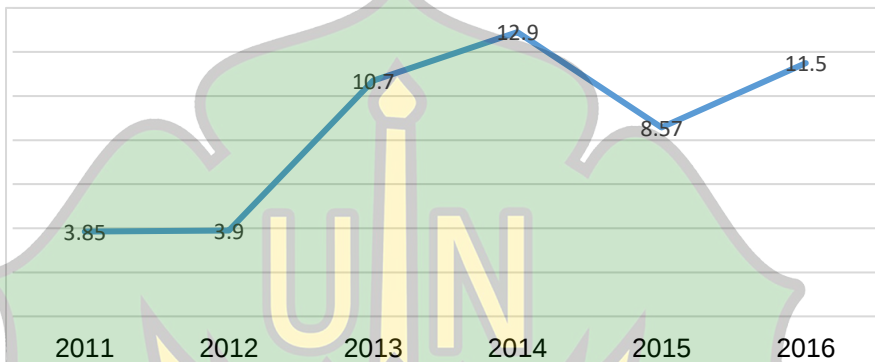


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Katadata 2021

Apabila dilihat dari data grafik 1.4 Upah minimum Provinsi (UMP) Aceh 2017 mengalami kenaikan pada tahun 2015 ke 2016 dari Rp 1.900.000 menjadi Rp 2.118.500. kenaikan terjadi lagi pada tahun 2017 sebesar 18 persen menjadi Rp 2.500.000 dari tahun sebelumnya Rp 2.118.500 per bulan. Angka ini berada jauh di atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 8,25 persen dan juga lebih tinggi dari rata-rata kenaikan UMP 34 provinsi sebesar 8,91 persen. UMP tertinggi tercatat oleh Provinsi DKI Jakarta, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 2.700.000 per bulan dan mengalami kenaikan setiap bulannya sehingga pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp 3.600.000 per bulan, sementara UMP terendah adalah Yogyakarta, yaitu Rp 1.350.000 per bulan.

Berikut kenaikan upah minimum provinsi Aceh dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.5
Angka Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi Aceh
(2011-2016)
(Persentase)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

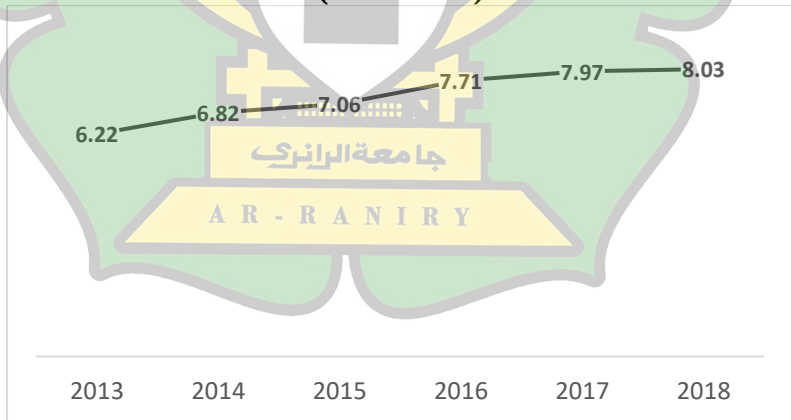
Berdasarkan grafik 1.5 menunjukkan bahwa upah minimum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2011 upah minimum perbulannya adalah sebesar Rp. 1.350.000 yaitu 3,85% meningkat menjadi Rp 1.400.000 yaitu 3,9% pada tahun 2012. Peningkatan terjadi setiap tahunnya yaitu tahun 2013 dan 2014 yaitu 10,7% dan 12,9% yaitu sebesar Rp 1.550.000 dan Rp 1.750.000. Upah atau gaji minimum pada tahun 2015 meningkat sebanyak Rp 1.900.000 menjadi Rp. 2.118.500 atau 11,50% pada tahun 2016 yang menunjukkan peningkatan yang tertinggi. Peningkatan upah minimum dianggap normal karena hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi layak.

Selain pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional, dana otonomi khusus juga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi walaupun pemerintah telah memberikan perhatian khusus dengan memberikan dana otonomi khusus untuk Aceh. Otonomi khusus (Otsus) merupakan suatu bagian perubahan pada masa konflik di Aceh yang berlangsung lama sehingga aceh menjadi pusat perhatian dunia serta usaha perdamaian yang bersamaan dengan semangat bangkitnya serta keinginan maju selepas bencana tsunami. Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan sebuah anugerah bagi daerah Aceh dengan tujuan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang telah berlangsung secara berkepanjangan (Alfiady dan Dewi, 2019). Seluruh komponen secara bersamaan memberikan perhatian dan potensi bangsa dalam memajukan dan meningkatkan pembangunan di Aceh dengan tujuan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Aceh memperoleh dana otonomi khusus yang dimulai dari tahun 2008 hingga 2027 yaitu Rp 100 triliun. Tahun 2008 sampai dengan 2016 berjumlah Rp 49.9 triliun diterima oleh provinsi Aceh dana otonomi khusus dari jumlah anggaran alokasi dana otonomi khusus Aceh. Sedangkan sisanya Rp 50,10 triliun untuk tahun 2017-2027. Aceh merupakan daerah yang menerima dana otsus selain Yogyakarta dan Papua. Namun dana otsus yang diterima

tidak membuat Aceh jauh lebih baik dan lebih maju dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu maka diadakan penilaian agar sisa dana otsus yang diterima Aceh benar-benar dapat menjadi dasar yang kuat bagi Aceh agar dapat mandiri di saat tidak ada lagi dana otsus yang diberikan (Iriansyah, 2016). Penerimaan dana otonomi khusus di Aceh selalu mengalami kenaikan dari tahun ke-tahunnya. Perkembangan realisasi penerimaan dalam APBN Aceh berupa pendapatan asli Aceh (PAA), berikut perkembangan penerimaan dana otsus selama 6 tahun yaitu 2013-2018 dapat dilihat pada grafik 1.6 berikut:

Grafik 1.6
Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
(2013-2018)
(Persentase)



Sumber: LHP BPK RI Atas LKPD Provinsi Aceh 2021

Grafik 1.6 di atas didapatkan dari data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 yang dipublikasikan. Data tersebut menunjukkan bahwa dana Otsus menjadi sumber penerimaan utama dan memiliki kontribusi terbesar pada total pendapatan Provinsi Aceh dengan rata-rata per tahunnya sebesar 58,06%. Sedangkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) hanya berkontribusi terhadap total pendapatan Aceh yaitu sebesar 13,42%. Rendahnya kontribusi PAA dibandingkan penerimaan dana Otsus menunjukkan belum optimalnya upaya untuk meningkatkan perolehan pendapatan yang bersumber dari potensi penerimaan yang dimiliki daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh masih sangat tergantung pada penerimaan dana Otsus untuk membiayai pembangunan di Aceh.

Pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan merupakan hal yang kompleks dan merupakan proyek nasional yang harus ditangani oleh pemerintah daerah ataupun pusat. Irfan (2016) pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan pengangguran terhadap kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan pengangguran memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel pengangguran dengan variabel Otonomi khusus. Karena provinsi Aceh adalah daerah yang sedang melakukan pembangunan dan mendapatkan dana otonomi khusus, maka penulis tertarik untuk mengetahui

kondisi kemiskinan dan bagaimana pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan, dan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Berapakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh
2. Berapakah upah minimum regional berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh
3. Berapakah Dana otonomi khusus berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh
4. Berapakah pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan dana otonomi khusus berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa besarkah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui berapa besarkah pengaruh upah minimum regional terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

3. Untuk mengetahui berapa besarkah pengaruh transfer dana otonomi khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui berapa besarkah pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan dana otonomi khusus terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis, yaitu:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan tambahan informasi bagi Kantor Statistik terkait dengan pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Statistik dalam melakukan analisis untuk pengambilan keputusan.
2. Manfaat Teoretis, yaitu:
 - a. Dapat menjadi tambahan literatur bagi akademik serta peneliti-peneliti selanjutnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan dana otonomi khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
 - b. Sebagai bahan acuan dalam pengetahuan dan dapat membantu penelitian selanjutnya agar menjadi yang lebih baik dan semakin *reliable*.
3. Manfaat Kebijakan, yaitu:

Penelitian ini dapat menunjukkan peran pemerintah dalam menentukan kebijakan serta menjalankan kebijakan tersebut dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan serta penggunaan cara pemerintah guna menurunkan angka kemiskinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II Landasan teori

Bab landasan teori ini berisi tentang kerangka teori, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

Bab metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian, data dan Teknik pemerolehan data, dan Teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini memuat deskripsi penelitian objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mandalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutupan dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kemiskinan

Salah satu penyebab penghambatan pada perkembangan sumber daya manusia adalah kemiskinan yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Hal ini disebabkan karena kemiskinan dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan standarnya untuk bertahan hidup seperti kebutuhan akan sandang, pangan, serta papan yang memadai. Terdapat beberapa pendapat yang mendefinisikan kemiskinan.

Kemiskinan memiliki definisi yang sangat beragam, dimana keberagaman ini muncul dikarenakan kemiskinan yang merupakan suatu masalah yang telah menyebar pada level multidimensional, dimana kemiskinan merupakan suatu problem yang berkaitan dengan berbagai macam dimensi kebutuhan masyarakat. Kemiskinan ada dikarenakan ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan utama yaitu berupa makanan dan perlengkapan lainnya yang bukan makanan yang diukur melalui pengeluaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk yang kurang mampu dapat diartikan individu yang memiliki pengeluaran perkapita perbulannya adalah rata-rata dibawah garis kemiskinan (BPS, 2017).

Definisikan lainnya dari kemiskinan yaitu “ketidakmampuan individu dalam melengkapi kebutuhan hidup terendah”. Dimana individu harus mampu memenuhi kebutuhan dasar diantaranya kebutuhan pokok. Dari Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan (Andiny dan Mandasari, 2017). Beik (2016) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dihadapi oleh individu yang tidak mempunyai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritualitas. Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa kemiskinan sebagai standar hidup minimum, dimana terdapat tingkatan kebutuhan materi yang rendah dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan dapat disimpulkan dimana sekelompok orang mengalami kekurangan sumber daya yang dapat mendukung kesejahteraannya.

2.1.1 Penyebab Kemiskinan

Masalah kemiskinan tidak hanya masalah *income* saja, melainkan terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang salah satunya menyangkut masalah akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian penanganan kemiskinan akan lebih komprehensif.

Menurut Sharp penyebab kemiskinan jika dipandang secara ekonomi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya (BPS, 2010);

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul dikarenakan ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, dan upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dikarenakan rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau keturunan.
- c. Kemiskinan karena perbedaan akses modal
Berdasarkan ukuran tersebut dapat dilihat hal yang paling penting adalah pendapatan rumah tangga, jika pendapatan rumah tangga meningkat maka secara otomatis akan meningkat konsumsi rumah tangga dan seterusnya sampai kemudian memasukan anak ke sekolah yang lebih tinggi.

2.1.2 Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Saputra (2011), ada beberapa jenis kemiskinan.

Yang pertama kemiskinan absolut, merupakan pendekatan yang di identifikasikan banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara, standar minimal antar negara berbeda dengan Negara lain. Kedua kemiskinan relative merupakan pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang berkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah. Ketiga kemiskinan struktural yaitu ketidakpercayaan sekelompok masyarakat pada sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan ter eksploitasi.

2.1.3 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan pada dasarnya belum ada yang benar-benar tepat dan sesuai untuk digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan yang dapat diberlakukan secara umum dan baku terhadap semua komunitas, bukan hanya dari aspek kehidupan ekonominya tetapi juga dari aspek lain, misalnya aspek sosial, hukum dan politik. Menurut Setiawan (2013) terdapat beberapa metode pengukuran yang digunakan dalam menetapkan indikator kemiskinan dapat dilihat

- a. Kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak;

- b. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif;
- c. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis;
- d. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup;
- e. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi;
- f. Ketidak berdayaan atau daya tawar yang rendah;
- g. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam waktu jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu bangsa. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi dapat menimbulkan dua efek penting, diantaranya adalah kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Ada beberapa definisi mengenai pertumbuhan ekonomi.

Sukirno (2013) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2013: 423).

Jinghan (2012:57) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Sedangkan Menurut Arsyad (2010) Pertumbuhan ekonomi dimana kenaikan *Gross Domestik Bruto* (GDP) dan Gross National Bruto (GNP) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan terjadi perbaikan struktur ekonomi atau sistem kelembagaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional riil atau produk domestik bruto dalam jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat lima teori yang mengenai pertumbuhan ekonomi (Arsyad ; 2010) yaitu:

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis yaitu pengembangan-pengembangan hak milik, spesialisasi, pembagian kerja yang merupakan faktor yang termasuk dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis dan laju perkembangan perekonomian masyarakat bergerak dari masyarakat tradisional menuju masyarakat

kapitalis. Berdasarkan pandangan ahli ekonomi Klasik terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.

b. Teori Pertumbuhan Rostow

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow berdasarkan pengalamannya pembangunan membagi proses pembangunan ekonomi negara menjadi lima tahapan diantaranya adalah: a. Tahap ekonomi tradisional b. Tahap ekonomi pra tinggal landas c. Tahap tinggal landas d. Tahap menuju kedewasaan e. Tahap konsumsi masyarakat tinggi

c. Teori Pertumbuhan Mahzab Keynesian

Menurut Mahzab Keynesian bahwa setiap perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasional untuk mengganti barang-barang modal. Harrod Domar menjelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan laju perekonomian diperlukan investasi sebagai tambahan stok modal.

d. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Model pertumbuhan Neo klasik berdasarkan pada skala hasil yang terus berkurang dari input tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi yang ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri

e. Teori Pertumbuhan Endogen Model

Teori ini menjelaskan adanya keanehan aliran modal internasional yang memperparah ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Teori ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Adapun faktor-faktor utama penyebab terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar negara adalah karena adanya perbedaan fiskal, modal insan, dan infrastruktur.

2.2.2 Faktor-faktor yang menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2013:429), faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu:

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya.

Kekayaan alam sangat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa awal dari proses pertumbuhan ekonomi. Dimana jika negara tersebut memiliki kekayaan alam yang dapat menguntungkan, sehingga hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat

b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah akan mendorong banyaknya jumlah tenaga kerja dimana penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Sebagai

akibatnya pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi.

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Pada masa modern pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Barang-barang modal yang sangat banyak jumlahnya, dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang para ahli-ahli ekonomi telah menjelaskan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Sikap masyarakat yang menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut.

2.2.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat (tidak dipengaruhi oleh perubahan harga) pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil

masyarakat pada tahun sebelumnya. Menurut Baeti (2013) terdapat tiga indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. Tingkat penghidupan masyarakat, merupakan peningkatan konsumsi potensial pada saat sekarang bila dibanding dengan tingkat konsumsi di masa lampau.
- b. Sumber-sumber produksi yang dimiliki dan dapat dipertahankan serta dimanfaatkan lebih efisien atau dapat ditemukan sumber-sumber produksi baru.
- c. Tingkat pendapatan nasional, Adalah peningkatan pendapatan nasional saat ini bila dibandingkan dengan pendapatan nasional sebelumnya.

2.3. Upah Minimum Regional

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang tidak asing lagi dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik negara maju maupun negara berkembang. Tujuan dari adanya kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari para pekerja dan keluarganya. Dengan kata lain, kebijakan upah minimum adalah untuk (a) menjamin penghasilan para pekerja sehingga tidak lebih rendah atau tidak sesuai dengan pekerjaannya, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efektif dan efisien.

2.3.1. Teori Upah

Upah dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran. Upah dapat diartikan sebagai pembayaran jasa-jasa fisik maupun mental kepada tenaga kerja. Upah uang yaitu jumlah uang yaitu diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. (Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010: 24).

Sistem pengupahan mengandung tiga prinsip yaitu:

1. Pemberian imbalan atau nilai pekerjaan
2. Penyediaan intensif
3. Jaminan kebutuhan buruh

Upah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap permintaan dan penawaran pada tenaga kerja, adanya perubahan upah akan mempengaruhi penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jika tingkat upah cenderung rendah maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan menjadi sedikit atau menurun.

David Ricardo mengemukakan Teori Upah Alam yang menjelaskan:

1. Upah menurut kodrat merupakan upah atau gaji yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya.

2. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar dimana upah yang terjadi di pasar akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah seiring upah menurut kodrat. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006).

Kaufman (dalam Achmad Khabhibi, 2010: 49), menjelaskan bahwa tujuan utama dari ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum atau terendah seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

2.4. Dana Otonomi Khusus

2.4.1 Sejarah Otonomi Khusus

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia dalam akar sejarahnya dikenal sebagai bangsa yang teguh mempertahankan kedaulatan nya semasa kolonialisme Belanda dan Inggris. Paska ditandatanganinya Trety of Sumatera Tahun 1871 yang berisi mengenai penyerahan Aceh dari Inggris kepada Belanda yang berakhir pada perang tahun 1873-1914, perjuangan terus dilakukan guna mengusir para penjajah. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan merdeka, residen Teungku Nyak arief dan Teungku Daud Beureueh sepakat untuk

menggabungkan diri dengan Republik Indonesia (Guru, 2000). Namun, terjadi perselisihan pendapat oleh elit aceh salah satunya Teungku Daud Beureueh yang tidak puas atas keputusan politik Republik Indonesia pada masa Hatta yang menempatkan Aceh setingkat dibawah Provinsi Sumatera Utara.

Pada era Orde Baru presiden Soekarno menerbitkan UU No.5 tahun 1945 yang membunuh kearifan adat istiadat lokal yang dipaksa agar seragam. Karena adanya kekecewaan dari kebijakan tersebut maka tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Salah satunya adalah dibuatnya MoU Helsinki yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 2006 yang terdiri dari 40 Bab dan 273 Pasal. Berikut ini beberapa kekhususan pengaturan yang terdapat pada UUPA 11 Juli 2006, antara lain:

1. Kewenangan Khusus
2. Lembaga di Daerah
3. Gubernur Aceh
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten/Kota (DPRA/K)
5. Partai Politik Lokal
6. Wali Nanggroe
7. pengakuan terhadap Lembaga Adat
8. Syariat Islam

9. Mahkamah Syar'iyah
10. Pengadilan HAM di Aceh
11. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh
12. Pengelolaan Sumber Daya Alam
13. Keuangan
14. Pertanahan

2.4.2 Pengertian Otonomi Khusus

Otonomi khusus merupakan suatu kewenangan khusus yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa daerah sendiri yang sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat tersebut, hal ini tercantum dalam UUD Nomor 32 Tahun 2004. Hak ini diberikan agar daerah tersebut dapat menata dan memajukan gar lebih baik pada bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Dana Otonomi Khusus merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah “tertentu” dengan tujuan membangun dan memajukan daerah tersebut agar sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat daerah tersebut.

2.4.3 Manfaat Otonomi Khusus

Manfaat Dana Otonomi Khusus Iriansyah (2016) menjelaskan bahwa seharusnya provinsi Aceh dapat berkembang dan lebih maju dengan adanya limpahan dana otsus tersebut.

Dengan adanya dana otsus tersebut diharapkan provinsi Aceh mampu mendorong terwujudnya ketertinggalan akibat adanya perselisihan dan bencana alam yang menimpa Aceh.

2.4.4 Daerah Yang Diberikan Otonomi Khusus

Indonesia merupakan suatu wilayah yang dibagi provinsi-provinsi yang memiliki kebudayaan dan keunikan nya tersendiri di seluruh Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum dengan Undang-Undang yang memperkuat negara mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Satuan pemerintah suatu wilayah yang bersifat khusus ialah daerah menerima atau diberikan dana otsus oleh negara melalui alokasi anggaran negara oleh pemerintah pusat. Daerah-daerah yang menerima dana otsus salah satunya adalah provinsi Aceh, selain itu ada daerah istimewa Yogyakarta dan Papua. Semua daerah khusus tersebut memiliki merupakan daerah dengan status istimewa, dimana pemerintah pusat memberikan dana otsus dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Pemerintah dan ketentuan khusus yang telah diatur dan tertera dalam Undang-Undang lainnya.

2.4.5 Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus

Aceh yang ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus merupakan daerah provinsi yang kesatuan masyarakat hukumnya bersifat istimewa dan diberi kewenangan atau hak khusus untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Provinsi Aceh diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2.4.6 Implementasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus

Kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sosial merupakan lima hal realisasi anggaran yang menjelaskan penggunaan anggaran dan dana otonomi khusus. Terdapat dalam Pasal 183 UU. No 11 Tahun 2006 yaitu:

1. Dana kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, digunakan untuk penyediaan obat-obatan pada Rumah Sakit, agar setiap rakyat Aceh yang berobat tidak dipungut bayaran, Pembangunan pos-pos kesehatan, memberikan bonus pada para medis dan lain-lain.
2. Dana Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Aceh mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, membangun asrama-asrama mahasiswa yang melanjutkan studi di luar Provinsi Aceh, menyubsidi Yayasan-yayasan pendidikan dan lain-lain.

3. Dana Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), digunakan untuk membantu pemberian modal kepada rakyat Aceh dalam melakukan aktivitas ekonomi.
4. Dana Infrasrtuktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah, jalan-jalan yang konsentrasi pemukiman rakyat Aceh, rehabilitasi atau membangun rumah-rumah sederhana untuk rakyat Aceh yang tidak mampu dan lain sebagainya.
5. Dana Sosial yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Sosial, digunakan untuk membantu rakyat Aceh dalam pengetasan masalah sosial, korban bencana alam, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial Akibat Konflik.(UUD, 1945).

2.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan sebelumnya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian pada variabel ini, adapun hasil dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini untuk membandingkan dan mengetahui hasil dari perbedaan pada penelitian ini. Dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dwihap sari (2017)	Analisis Pengaruh Pertumbuha n Ekonomi, Inflasi Dan Penganggura n Terhadap Kemiskinan di Indonesia (2000-2015)	Regresi linier berganda	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Demikian pula inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Untuk itu pemerintah hendaknya mengambil tindakan agar memperluas lapangan pekerjaan dan memperluas juga kesempatan kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
2.	Ihsan & Ikhsan (2018).	Analisis Pengaruh UMP, Inflasi dan Penganggura n terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh	Regresi linier berganda	Hasil menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, kemudian inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, sementara jumlah pengangguran berhubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
3.	Putro (2017)	Analisis determinasi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan	Analisis Jalur	Belanja modal pemerintah (X1), IPM (X2), dan Ketimpangan pendapatan/gini ratio (X3), terhadap PDRB (Y1) serta dampaknya terhadap variabel Kemiskinan (Y2) di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasar hasil analisis, variabel Belanja modal pemerintah, IPM, dan Ketimpangan pendapatan/ gini ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur baik secara

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel antara PDRB.
4	Yuliasih (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat	Regresi linier berganda	1) Pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat. 2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, inflasi 3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 4) kemiskinan sedangkan 5) pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. 6) Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat.
5	Kolibu, Rumate & Emgka (2017)	Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara	Regresi linier berganda	Tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan adalah bersifat positif, yang berarti jika investasi meningkat maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat.

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Alfiandy dan Dewi (2019)	Otonomi Khusus dan Kemiskinan di Aceh: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.	Pendekatan Kualitatif deskriptif secara naturalistik	Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Aceh
7	Kuswan toro dan Dewi (2016)	Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banter.	Analisis panel data	Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa produk domestik bruto terhadap permintaan uang (M2) di Indonesia periode 1985-2014 berpengaruh positif dan signifikan. Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa tingkat suku bunga terhadap permintaan uang (M2) di Indonesia periode 1985-2014 berpengaruh positif dan signifikan. Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa inflasi terhadap permintaan uang (M2) di Indonesia periode 1985-2014 berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil pengujian secara individu menunjukkan bahwa variabel dummy terhadap permintaan uang (M2) di Indonesia periode 1985-2014 berpengaruh positif dan signifikan

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
8	Muliadi dan Amri (2019)	Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pe moderasi	Regresi Panel	Penerimaan zakat dan DOK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan Secara parsial dampak negatif DOK terhadap kemiskinan lebih signifikan dibandingkan dengan dampak negatif penerimaan zakat.

Sumber: Data Diolah, 2021

2.6. Hubungan Antara Variabel

2.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan rendahnya selisih pendapatan antar individu. Namun, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh negara tidak diikuti oleh pemerataan yang layak. Kesenjangan ekonomi pada setiap daerah sering kali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah mampu meraih pertumbuhan yang lumayan cepat, namun ada beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cukup lambat. Daerah yang pertumbuhannya cukup lambat tersebut disebabkan karena minimnya sumber daya, investor yang cenderung menanam modal pada perkotaan telah memiliki fasilitas yang lebih memadai atau maju, dengan kata lain wilayah tersebut tidak menjadi pusat investasi karena pasilitas yang tidak memadai (Sjafrizal: 2012).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat memberi pengaruh bagi daerah lain baik secara positif maupun sisi negatif. apabila pertumbuhan pada suatu daerah menyebabkan perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi pengaruh yang baik (positif) karena terjadi proses penetasan ke bawah (*trickling down effect*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi pengaruh yang kurang baik (negatif) karena terjadi proses pengutuban (*polarization effect*) (Pangkiro, 2016).

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan fungsi dari waktu. Pada tahap awal perbedaan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar antar daerah telah mengakibatkan menurunnya distribusi pendapatan antar daerah. Namun dalam jangka panjang ketika faktor-faktor produksi di daerah semakin dioptimalkan dalam pembangunan maka perbedaan laju pertumbuhan output antar daerah cenderung menurun.

2.6.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan

Tujuan utama ditetapkan dan diberlakukan upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok, diantaranya adalah kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk menaikkan derajat penduduk yang memiliki pendapatan rendah, terutama pekerja kalangan kurang mampu atau miskin. Semakin meningkatnya tingkat upah minimum maka pendapatan yang diperoleh masyarakat untuk meningkatkan sehingga kesejahteraan

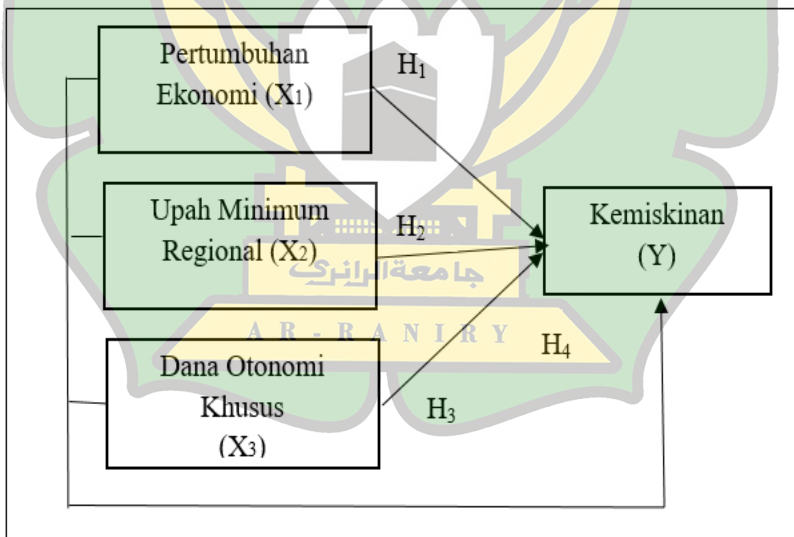
masyarakat juga meningkat sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman 2000 dalam Achmad Khabhibi, 2010: 49).

Penetapan upah minimum tidak terlepas dari peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah guna menyikapi dampak penetapan upah minimum. Hal ini dikarenakan bukan pengusaha saja yang menanggung dampak penetapan upah minimum. Namun, dengan adanya pengertian dan pemahaman serta kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik.

2.6.3 Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan

Otonomi khusus sangat erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Dari pembahasan sebelumnya sesuai dengan Pasal 183 UU No. 11 Tahun 2006 untuk Pemerintah Aceh. Bahwa otonomi khusus merupakan kesempatan yang sangat besar bagi Aceh yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk merealisasikan percepatan pembangunan tersebut melalui program prioritas yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Program prioritas tersebut meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Dengan adanya dana otonomi khusus ini diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan yang melanda Indonesia khususnya provinsi Aceh.

Tidak hanya pengeluaran per kapita memiliki hubungan yang sangat erat terhadap tingkat kemiskinan. Dana otonomi khusus juga memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Dimana tujuannya adalah untuk mempercepat provinsi Aceh mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya dan terutama dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dari sisi tingkat kemiskinan semakin besar pengeluaran per kapita maka akan semakin bagus, hal ini bertujuan guna perputaran roda perekonomian yang lebih baik dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di provinsi aceh. Namun sebaliknya apabila pengeluaran per kapita sedikit maka berdampak buruk pada penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Penelitian ini ingin menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan otonomi dana khusus memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut asas koherensi, mengingat premis merupakan informasi yang bersumber dari pernyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh beda dengan premisnya (Muhammad, 2008). Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Regional, dan Dana Otonomi Khusus secara bersama-sama diduga berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
- H₂ : Pertumbuhan ekonomi secara parsial diduga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
- H₃ : Upah Minimum Regional secara parsial diduga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
- H₄ : Dana Otonomi Khusus secara parsial diduga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2015:14) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik atau lebih berfokus terhadap angka. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan hubungan antara variabel yang diuji melalui pengujian hipotesa. Penelitian ini menguji 3 variabel bebas (independen) yaitu pertumbuhan ekonomi, Upah minimum regional, serta dana otonomi khusus, dan 1 variabel terikat (dependen) yaitu kemiskinan.

3.2 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh, ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan dana otonomi khusus terhadap kemiskinan di Aceh.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 2017:130). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data yaitu kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Penelitian ini menggunakan data deret waktu pada tahun 2008-2020 serta data *cross section* yang terdiri dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Data bersumber dari observasi langsung pada kantor BAPPEDA Provinsi aceh guna memperoleh data variabel dependen yaitu dana Otonomi Khusus, sedangkan data variabel lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan kemiskinan diperoleh melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu www.bps.go.id. Serta buku dan jurnal ter publikasi yang berhubungan dengan variabel penelitian. Data didapat dalam bentuk tahunan yaitu dari tahun 2008-2020 kabupaten/kota di Aceh.

3.4 Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sugiono, 2014). Sampel penelitian adalah sebanyak 299 sampel yang didapat dari data panel yang merupakan gabungan *time series* untuk masa 13 tahun dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 dan *cross section* sebanyak 23 kabupaten kota. Dengan kurun waktu 13

tahun dengan 23 kabupaten/kota di Aceh sehingga sampel berjumlah 299 sampel.

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama bagi peneliti (Sekaran & Bougie, 2017:77) variabel terikat atau variabel dependen yang sering juga dilambangkan dengan Y yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono: 2014). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan.

3.5.2 Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen atau sering dikenal juga dengan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel terikat (Sugiyono: 14). Sekaran dan Bougie, (2017:79) menjelaskan bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif, dimana apabila ada variabel terikat, maka akan ada juga variabel bebas, dan setiap unit kenaikan variabel bebas, maka terdapat pula kenaikan atau penurunan pada variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan dana otonomi khusus.

3.6 Operasional Variabel

Berdasarkan hasil identifikasi variabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan definisi operasional variabel dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Definisi dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator / Rumusan	Satuan Data
Variabel : Independent			
Pertumbuhan Ekonomi (X ₁)	Perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal (Sukirno, 2013)	a. Tingkat penghidupan masyarakat; b. Sumber-sumber produksi c. Tingkat pendapatan nasional.	Rasio
Upah Minimum Regional (X ₂)	Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap (Permenaker 01/1999).	Indeks Harga Konsumen, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Rasio
Dan Otonomi Khusus (X ₃)	Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.	Dana Otsus Aceh ditentukan setara 2 persen sedangkan dari pagu DAU (Dana Alokasi Umum) nasional.	Rasio
Dependen			
Kemiskinan (Y)	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan	a. Kurangnya pangan, sandang dan perumahan	Rasio

	bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2017).	yang tidak layak; b. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; c. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis; d. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; e. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; f. Ketidak berdayaan atau daya tawar yang rendah; g. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.	
--	---	---	--

Sumber : Data diolah, 2021

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1. Model Estimasi Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yaitu gabungan data *cross section* dan *time series*. Model regresi pada data panel terdiri dari tiga teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi, diantaranya adalah *Common Effect*

Model (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) (Hidyat dan Nalle: 2017).

1. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model merupakan teknik estimasi paling sederhana dimana model ini hanya mengkombinasikan antara *time series* dan *cross section*. Pada pendekatan ini, data antara *time series* dan *cross section* diperlakukan lalu diregresikan menggunakan metode *ordinary Least Square* (OLS) dalam mengestimasi data panel. Menurut (Widarjono dan Latucansina: 2017) mengatakan bahwa model CEM α konstan atau sama tiap individunya maupun periodenya. Secara umum, persamaan modelnya ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

- Y_{it} : variabel respon pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t
- X_{it} : variabel eksogen (independent)
- α : Konstanta
- β : Koefisien *Slope* dan koefisien arah
- e_{it} : Galat atau komponen *error* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

CEM dinyatakan dalam persamaan dengan menggunakan logaritma natural ($\ln$) yaitu sebagai berikut:

$$\ln K_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PE_{it} + \beta_2 \ln UMR_{it} + \beta_3 \ln DOK_{it} + e_{it} \dots\dots\dots$$

Keterangan:

- K : Tingkat Kemiskinan
- $\ln$: Logaritma natural
- α : Konstanta
- β : Beta
- it : Variabel individu ke- i dan periode ke- t
- PE : Pertumbuhan Ekonomi
- UMR : Upah Minimum Regional
- DOK : Dana Otonomi Khusus
- e_{it} : Galat atau komponen *error* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model FEM merupakan model dengan satu objek yang memiliki konstanta yang besarnya untuk berbagai periode waktu dengan koefisien regresinya dengan besaran tetap dari waktu ke waktu (*time invariant*). Estimasi pada model ini dapat dilakukan dengan atau tanpa pembobotan atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)* dan dengan pembobotan (*cross section weight*) atau *General Least Square (GLS)*. Penggunaan model ini tepat digunakan

untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasikan data. Secara umum, persamaan model ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan:

- Y_{it} : Variabel respon pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t
- X_{it} : Variabel predictor pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t
- α : Konstanta
- β : Koefisien *Slope* dan koefisien arah
- e_i : Galat atau komponen *error* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

Indeks I pada intersep (α_i) menunjukkan bahwa intersep dari masing-masing individu berbeda, namun masing-masing intersep unit *time series* tetap (konstan). FEM dinyatakan dalam persamaan $\ln$ (logaritma natural) sebagai berikut:

$$\ln K_{it} = \alpha_i + \beta_1 \ln PE_{it} + \beta_2 \ln UMR_{it} + \beta_3 \ln DOK_{it} + e_{it} \dots (3.4)$$

Keterangan:

- K : Tingkat Kemiskinan
- $\ln$: Logaritma natural
- α : Konstanta

- β : Beta
 it : Variabel individu ke- I dan periode ke- t
 PE : Pertumbuhan Ekonomi
 UMR : Upah Minimum Regional
 DOK : Dana Otonomi Khusus
 α_i : Galat atau komponen *error* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

3. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model (REM) merupakan model yang digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.

Model ini mengestimasi data panel, variabel pengguna kemungkinan akan saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada metode REM perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing daerah. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS). Dalam REM juga menghitung bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section. Secara umum, persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.5)$$

Keterangan:

Y_{it} : Variabel respon pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

X_{it} : Variabel predictor pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

α : Konstanta

β : Koefisien *Slope* dan koefisien arah

e_{it} : Galat atau komponen *error* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

Asumsi e_{it} merupakan variabel *random* dari unit intersep. REM dituliskan dalam persamaan dengan menggunakan $\ln$ (logaritma natural) sebagai berikut:

$$\ln K_{it} = \alpha_i + \beta_1 \ln PE_{it} + \beta_2 \ln UMR_{it} + \beta_3 \ln DOK_{it} + e_{it} \dots (3.6)$$

Keterangan:

K : Tingkat Kemiskinan

$\ln$: Logaritma natural

α : Konstanta

β : Beta

it : Variabel individu ke- I dan periode ke- t

PE : Pertumbuhan Ekonomi

UMR : Upah Minimum Regional

DOK : Dana Otonomi Khusus

α_{it} : Galat atau komponen *error* pada unit observasi ke- i dan waktu ke- t

3.7.2. Uji *Goodness of Fit*

Menurut Hidayat dan Nalle (2017) untuk menentukan model yang tepat dalam analisis regresi data panel, digunakan uji Goodnes of Fit yaitu dengan melakukan Chow test dan Hausman test dengan kriteria sebagai berikut:

a. Chow Test

Uji ini digunakan dengan tujuan menentukan pilihan antar metode CEM atau FEM, dengan menggunakan hipotesis: H_0 : Metode yang dipilih Common Effetc Model (CEM) H_1 : Metode yang dipilih Fixed Effect Model (FEM). Dalam melakukan pengujian ini yaitu dengan melihat p-value. Apabila p-value kurang dari 0,05 (5 persen) maka model yang digunakan dalam uji ini adalah Fixed Effect (Hidayat dan Nalle, 2017). Namun apabila p-value lebih dari 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Common Effect.

b. Hausman Test

Uji ini digunakan menentukan pilihan antara metode REM atau FEM, dengan menggunakan hipotesis: H_0 : metode yang dipilih Random Effect Model (REM) H_1 : metode yang dipilih Fixed Effect Model (FEM). Dasar penolakan H_0 dengan menggunakan pertimbangan probabilitas dari cross section random. Jika probabilitas dari cross section random $< 0,05$ (5 persen) maka

model yang digunakan adalah fixed effect (Hidayat dan Nalle, 2017). Namun apabila cross section random > 0.05 maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect*.

3.8 Uji Signifikan Parameter Individu (Uji t)

Setelah melalui beberapa pengujian di atas, maka dilakukanlah uji hipotesis untuk mengetahui berpengaruh tidaknya variabel independent terhadap variabel dependent. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai probabilitas di setiap variabel lebih kecil dari konstanta ($\text{prob} < 0,05$). Untuk mengetahui hasil dari uji t, digunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_1 : Masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria pengambilan keputusannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas (signifikan) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas (signifikan) $< 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.9 Uji Signifikansi F (Uji F)

a. Uji Simultan (F)

Uji statistik f dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil dari uji f yang digunakan untuk mengetahui hipotesis penelitian, maka menggunakan dasar pengambilan keputusan dimana jika nilai probabilitas (signifikansi) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan apabila nilai probabilitas (signifikansi) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_{01} : Pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan, dana otonomi khusus secara bersama-sama diduga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

H_{a1} : Pertumbuhan ekonomi , upah minimum dan, dana otonomi khusus secara bersama-sama diduga berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

3.10 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama digunakan koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 bermakna bahwa variabel-variabel independen akan memberikan hampir seluruh informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Sani dan Maharani, 2013: 65).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh

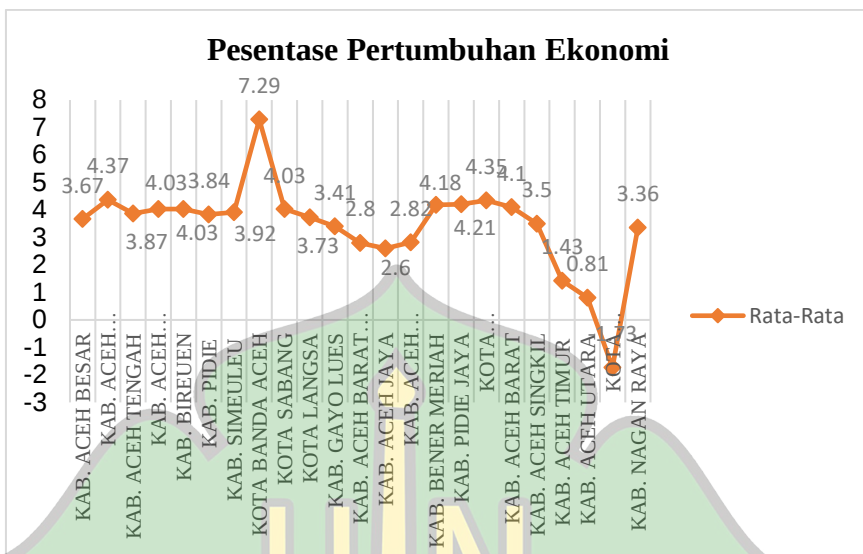
Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten dan Kota, terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Wilayah provinsi Aceh adalah 5.677.081ha; Dengan luas hutan 2.270.080 ha dan sekitar 800.401 ha luas perkebunan sedangkan kawasan industri sebesar 3.928 ha. Dengan jumlah penduduk Aceh pada akhir tahun 2020 adalah 5.371.532 Jiwa, Kota Sabang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh yakni sebesar 0,10 persen dengan jumlah penduduk terkecil sebesar 34.874 jiwa, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Aceh Jaya yakni sebesar 7,90 persen. Sebaran penduduk di wilayah aceh masih belum merata. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Aceh Utara sebesar 6.19.470 jiwa.

Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan

Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dengan batas wilayahnya: sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Aceh mempunyai beragam kekayaan sumberdaya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan, perikanan darat dan laut, pertambangan umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Agregat ekonomi makro yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2008-2020 yang di dapat dari laporan Badan Pusat Statistik. Berikut dapat kita lihat average pertumbuhan ekonomi tahun 2008-2020 kabupaten/kota di Aceh.



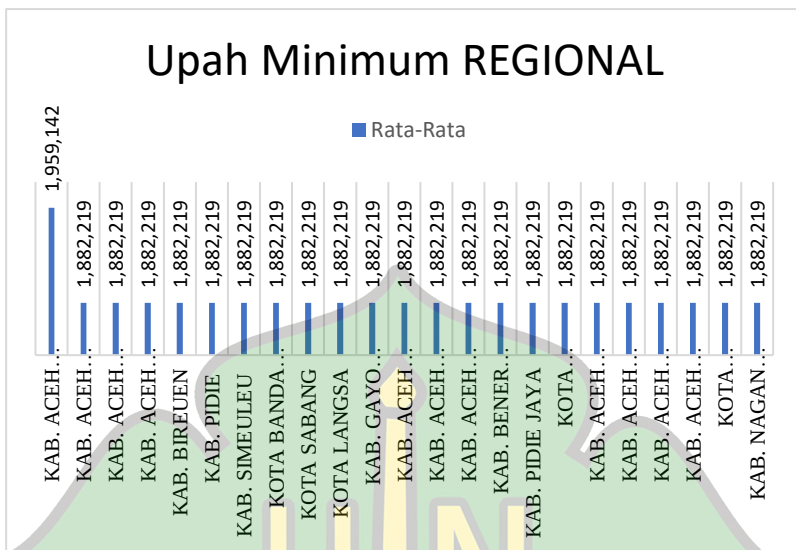
Grafik 4.1
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 2008-2020

Dari grafik diatas dapat kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Aceh selama periode pengamatan tahun 2008-2020 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.1 mengalami fluktuasi, peningkatan ekonomi tertinggi terlihat pada kota banda aceh 7,29% dan diikuti oleh kabupaten kota Aceh Selatan sebesar 4,37%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kota Lhokseumawe sebesar -1,73% dan Aceh Utara sebesar 0,81%. Penurunan ini lebih disebabkan oleh pandemi virus Corona (Covid-19) yang dialami oleh seluruh dunia dan termasuk Aceh sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Aceh.

4.1.2 Upah Minimum Regional

Upah dan pengangguran memiliki hubungan yang cukup erat dimana upah yang tinggi maupun rendah akan berimbas terhadap jumlah permintaan serta penawaran terhadap tenaga kerja yang pada akhirnya akan berimbas pada angka pengangguran. Upah merupakan bayaran atas jasa-jasa secara fisik maupun mental kepada tenaga kerja. Upah Minimum setiap kabupaten/kota sama, namun berbeda pada setiap provinsi. Upah minimum Regional pada umumnya mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dimana harga barang semakin meningkat sehingga harus di imbangi oleh upah yang diterima guna kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali provinsi Aceh yang terdapat Upah minimum yang lumayan tinggi dibandingkan beberapa provinsi yaitu sebesar 2 jutaan. Penelitian ini menggunakan data kenaikan upah minimum regional 2008-2020 yang di dapat dari laporan Badan Pusat Statistik.

Berikut dapat kita lihat grafik Rata-Rata Upah Minimum Regional Kabupaten/kota di Aceh tahun 2008-2020:



Grafik 4.2
Upah Minimum Regional Provinsi Aceh 2008-2020

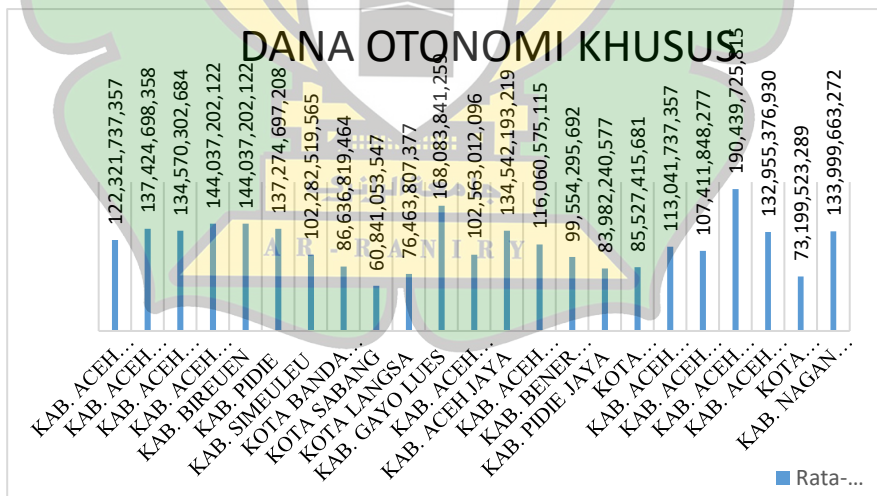
Dari grafik diatas dapat di lihat rata-rata upah di provinsi Aceh atau kabupaten/kota di Aceh memiliki upah minimum yang sama selama periode pengamatan tahun 2008-2020 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.1. Namun, pada tahun berjalan upah minimum regional mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kenaikan upah minimum regional di duga akan mengalami peningkatan seiring perkembangan waktu yang menuntut pendapatan semakin tinggi guna kesejahteraan masyarakatnya.

4.1.3 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus, yaitu dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah “tertentu” untuk

membangun sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Daerah Otonomi Khusus Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Penelitian ini menggunakan data Dana Otonomi Khusus yang diperoleh langsung dari Kantor BAPPEDA Aceh.

Berikut dapat kita lihat grafik Rata-Rata Dana Otonomi Khusus kabupaten/kota di Aceh tahun 2008-2020:



Grafik 4.3
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh 2008-2020

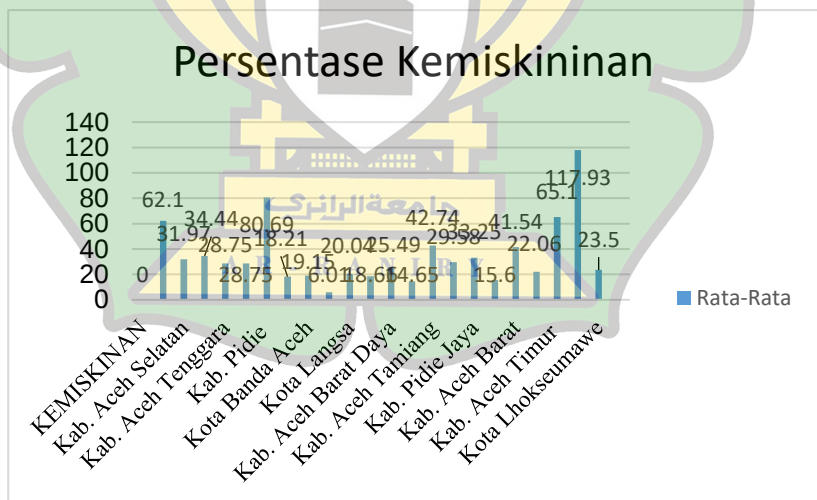
Berdasarkan hasil grafik 4.3, pertumbuhan rata-rata dana otsus kabupaten/kota di Aceh mengalami perubahan setiap tahunnya, yaitu dapat diamati pada Kabupaten/kota gayo lues terdapat dana otonomi khusus Rp. 168.083.841.259 dan Aceh Utara Rp. 190.439.725.815 dan diikuti oleh kabupaten/kota Aceh Tenggara dan Bireun sekitar 144 M. sedangkan rata-rata dana otonomi khusus kabupaten kota tahun 2008-2020 di Aceh adalah kabupaten/kota Sabang dan Lhokseumawe. Namun secara umum dana utoonomi khusus tahun 2008 provinsi Aceh sebesar Rp. 3. 530.010.000 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2010 yaitu mencapai Rp. 8.029.791.980, peningkatan dana otonomi khusus guna meningkatkan kesejahteraan aceh sehingga dana otonomi khusus aceh mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 dana otonomi khusus mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 7.555.278.348.000, hal ini diduga karena adanya wabah penyakit yang menyebar di seluruh dunia yang berimbas pada perekonomian yaitu Covid-19, tidak terkecuali provinsi Aceh juga terkena dampak karena covid-19 khususnya sektor perekonomian.

4.1.4 Tingkat Kemiskinan

Pada saat terjadi krisis ekonomi 1997/1998, BKKBN menggolongkan keluarga miskin menjadi Keluarga Prasejahtera Plus (KPS+), yakni keluarga yang memenuhi kriteria KPS ditambah lima kriteria lainnya, yaitu: (i) kepala keluarga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK); (ii) anak putus sekolah; (iii)

tidak mampu berobat bila sakit; (iv) tidak mampu makan dua kali sehari; dan (v) tidak mampu mengonsumsi lauk-pauk yang berprotein.

Alokasi program yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat di suatu wilayah (kabupaten/kota) ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota dengan langkah-langkah untuk menentukan penduduk miskin di wilayahnya. Untuk menentukan kriteria penduduk miskin, disyaratkan beberapa hal mengenai cakupan dan definisi keluarga, pelaksana pendataan, kriteria penduduk miskin, dan alat analisis untuk menentukan penduduk miskin. Penanggung jawab pelaksanaan pendataan ini adalah pemerintah kabupaten/kota. Grafik rata-rata Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Aceh tahun 2008-2020 dapat dilihat dibawah ini.



Grafik 4.4
Grafik Rata-Rata Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh 2008-2020

Berdasarkan hasil grafik diatas, tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Aceh didapatkan nilai kemiskinan dengan angka tertinggi terdapat pada kabupaten/kota Aceh Utara sebesar 117,93% dan diikuti oleh kabupaten/kota di tahun 2008 yaitu sebesar 23,53% dan angka 80,63%, kemudian aceh timur 6,5% dan 62,1% terdapat pada kabupaten Aceh Besar. Sedangkan rata-rata persentase kemiskinan tahun 2008-2020 kabupaten/kota terendah terdapat pada kota sabang sebesar 6,01% dan terendah kedua adalah kabupaten aceh jaya sebesar 14,65 dan rata-rata tingkat kemiskinan terendah selanjutnya adalah kabupaten Subussalam sebesar 15,6%. ditahun 2020 dengan angka kemiskinan 14,99%. Hingga saat ini, Aceh masih merupakan provinsi termiskin di Indonesia khususnya pulau Sumatera. Harapan saat ini adalah program yang dimiliki seperti program yang diarahkan ke desa yang dapat menekan naiknya angka kemiskinan.

4.2 Estimasi Data Panel

Pendekatan estimasi data panel terdiri dari tiga macam yaitu, pendekatan kuadrat terkecil *Common Effect Model* (CEM), pendekatan efek tetap *Fixed Effect Model* (FEM), dan pendekatan efek acak *Random Effect Model* (REM), dimana untuk memilih metode terbaik dalam data panel dilakukan uji *Goodness of fit* dengan menggunakan *Chow test* dan *Hausman Test*.

4.2.1 Hasil Chow Test

Pengujian ini memilih apakah model yang digunakan *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), maka dilakukan uji *f restricted* dengan membandingkan nilai *cross section* F. dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Pengujian yang dilakukan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas *cross section* $F > a$ (0,05) maka terima H_0 tolak H_1
- Jika nilai probabilitas *cross section* $F < a$ (0,05) maka terima H_1 tolak H_0

Hasil uji chow dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Hasil Chow Test

Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.848325	(22,270)	0.0000
Cross-section Chi-square	131.249497	22	0.0000

Sumber: Data diolah (2022)

Dari hasil *Chow test* pada pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas *cross section* F sebesar 0.000 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section* $F < 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) hasil ini menunjukkan bahwa tolak H_0 terima H_1 . Sehingga model

yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

4.2.2 Hasil Hausman Test

Hausman test merupakan pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memiliki apakah menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM), pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Pengujian yang dilakukan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas *cross section random* $> \alpha$ (0,05) maka terima H_0 tolak H_1
- Jika nilai probabilitas *cross section random* $< \alpha$ (0,05) maka terima H_1 tolak H_0

Hasil uji hausman dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Hasil Hausman test

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.328343	3	0.0101

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 hasil hausman pada pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas *cross section random* sebesar 0,01 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section random*

$<0,05$ ($0,01 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa terima H_1 tolak H_0 . Maka model regresi data panel yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan hasil uji model data panel terbaik dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji Chow dan uji hausman, maka yang terpilih sebagai model data panel dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) atau juga disebut dengan model *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

4.3 Hasil Uji Goodness of Fit

Hasil uji *Goodness of Fit* pada estimasi regresi data panel, diperoleh model terbaik yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengolahan dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UMR	-2.38E-07	2.14E-07	-1.099983	0.2762
OTSUS	2.51E-12	6.22E-12	4.005438	0.0001
PE	0.042339	0.102716	1.976784	0.0498
C	-0.601742	1.212372	-0.498753	0.0543
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.660725	Mean dependent var		3.765321
Adjusted R-squared	0.621985	S.D. dependent var		2.565321
S.E. of regression	2.542760	Akaike info criterion		4.665432
Sum squared resid	1333.908	Schwarz criterion		4.887543
Log likelihood	-6873219	Hannan-Quinn criter.		4.987531
F-statistic	7.110120	Durbin-Watson stat		1.432189
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah (2022)

Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$K = -0,601742 + 0,042339PE - 2,38UMR + 2,51DOK + e$$

Dimana:

K = Kemiskinan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

UMR = Upah Minimum Regional

DOK = Dana Otonomi Khusus

Hasil estimasi nilai signifikansi statistik F sebesar ($0,0000 < 0,05$), hasil ini menunjukkan bahwa model yang digunakan eksis. Variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan dana otonomi khusus yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Nilai konstanta sebesar -0,601742 menunjukkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan dana otonomi khusus sebesar 0 (nol), maka kemiskinan berkurang sebesar 60,17%.

4.4 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) memiliki probabilitas sebesar 0,049 sehingga $0,049 < 0,05$ (lebih kecil dari 0,05) dan koefisien sebesar 0,042339. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan kemiskinan semakin

meningkat. Hal ini dikarenakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Aceh hanya tergantung dengan dana APBA dan kegiatan pemerintah lainnya. Hal ini di dukung dengan pernyataan perwakilan Bank Indonesia bahwa “Perekonomian di Aceh masih sangat bergantung dari perputaran uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA). Bergantungnya perekonomian daerah pada anggaran Negara tentu bukanlah hal yang baik. Karena seharusnya perekonomian itu digerakkan oleh sektor swasta, karena itu sebaiknya APBA harus optimal dimanfaatkan untuk menggerakkan tumbuhnya sektor swasta di Aceh” (Serambinews, 2017).

Disisi lain, investasi di sektor usaha sangat sedikit terealisasi di Aceh. Sehingga secara rill tidak berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di aceh. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di teliti oleh Pangiuk (2018), dimana hasil penelitiannya menunjukkan meskipun nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah Provinsi Jambi, namun tidak membawa dampak yang baik terhadap kemiskinan.

Variabel upah minimum regional (X_2) memiliki probabilitas sebesar 0,2762 dimana probabilitas lebih besar dari nilai α yaitu $0,2762 > 0,05$ dengan koefisien -2,38 hal ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum regional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Setiap provinsi di Indonesia memiliki

upah minimum regional sesuai dengan Hasil penelitian ini tidak mendukung pada penelitian Ihsan & Ikhsan (2018) dan kuswantoro & dewi (2016). Dimana upah minimum regional berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Variabel dana otonomi khusus (X_3) memiliki probabilitas sebesar 0,0001 dimana hasil ini menunjukkan lebih kecil dari α 0,05 ($0,0001 < 0,05$) dengan nilai koefisien 2,51. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana otonomi khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari, serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiandy & dewi (2019) yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya dimana dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak dapat menekan meningkatnya kemiskinan di provinsi Aceh. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muliadi dan Amri (2019) yang menunjukkan

bahwa hasil penelitian dana otonomi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

4.5 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi menunjukkan sebesar apa variabel independen menjelaskan dependen dalam penelitian ini. Variabel independen pada penelitian ini diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan dana otonomi khusus, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan. Pada tabel 4.3 dapat diketahui nilai R^2 dalam model tersebut berjumlah 0,660725 menunjukkan bahwa 66,07% variabel independen yang digunakan pada penelitian ini dapat menjelaskan model, namun 33,93% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen dalam penelitian ini diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan dana otonomi khusus terhadap kemiskinan di provinsi Aceh selama tahun 2008-2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan serambi mekah Aceh masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Kemiskinan dapat dijadikan sebagai tolak ukur martabat suatu negara Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang mendasar, hal ini dikarenakan kemiskinan masih berkaitan dengan kebutuhan paling utama yang dapat dipenuhi. Kemiskinan merupakan permasalahan mendunia hal ini disebabkan oleh hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan kemsikinan. Terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi perubahan angka kemiskinan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dana otsus dan banyak faktor lainnya.

2. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian sebanyak 13 tahun yaitu 2008-2020 dengan data 23 Kibupaten/kota kabupaten/kota di Aceh sehingga terdapat 299 jumlah observasi. Variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen diantaranya pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan dana otonomi khusus, serta satu variabel dependen yaitu kemiskinan. Model analisis dalam penelitian ini adalah model regresi liner dengan data *panel*.
3. Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan dana otonomi khusus secara simultan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di provinsi Aceh pada tahun 2008-2020, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu membawa hal positif yaitu adanya penurunan kemiskinan, dan upah minimum yang tinggi akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Serta tingginya dana otonomi khusus akan berdampak pada penurunan kemiskinan.
4. Pertumbuhan ekonomi dan Otonomi dana khusus secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh. Namun, upah minimum regional secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk menambah banyaknya sampel yaitu menambah tahun penelitian dan 2 kali pengambilan sampel dalam setahun.
2. Untuk menambah kekuatan model penelitian, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya yang mungkin memiliki hubungan dengan tingkat kemiskinan seperti ketenagakerjaan, inflasi, bahkan dampak covid-19 sehingga hasil penelitian lebih baik lagi.
3. Untuk pemerintah Provinsi Aceh khususnya, agar lebih memperhatikan lagi tingkat pendorong kebijakan, karena keduanya dapat mempengaruhi kemiskinan
4. Dikarenakan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membawa pengaruh pada kenaikan dan turunnya kemiskinan, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi sektor swasta yang ada, sehingga dapat memperbaiki tingkat kemiskinan, iklim investasi yang baik bagi swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiny, Puti. Mandasari, Pipit. 2017. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi), Vol. 1, No. 2, Desember 2017.
- Alfiady, T., dan Dewi, R. (2019). *Otonomi Khusus dan Kemiskinan di Aceh: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bara di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Jurnalisme. Vol 9(1), 38-60, 2019.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2010, Teori Kemiskinan, Jakarta.
- _____. (2017) <http://aceh.bps.go.id>
- _____. (2018) <http://aceh.bps.go.id>
- _____. (2019) <http://aceh.bps.go.id>
- _____. (2020) <http://aceh.bps.go.id>
- Beik. Irfan Syauqi. (2016) *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta : Rajagrafindo.
- Baeti, Nur. 2013. *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap*

Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan: Vol. 2 (3) 2013.

Didu, Saharuddin. Dan Fauzi Ferri (2016) *Pengurangan Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Ddi Kabupaten Lebak. Jurnal Ekonomi-Qu (Juenal Ilmu Ekonomi). Vol 6 (1), 102-117, 2016.*

Dwihapsari, (2017) *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (2000-2015).* Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima), Semarang: Universitas Diponegoro*

Guru. Syahda LS. (2000). *Menimbang Otonomi vs Federal.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

I Made, Yogatama. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Upah Kerja, dan Nilai Total Ekspor Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia (1990-2009).* Semarang: UNDIP.

Ihsan, Khairil, dan Ikhsan (2018). *Analisis Pengaruh UMP, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM). 3(3), 408-419.

Iriansyah, Nova. (2016). *Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan dan Kemandirian Bagi Kota Otonomi Khusus. Banda Aceh.*

Jhingan, ML. (2012). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Khabibi, Achmad. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan.* Surakarta: USM.

- Kiswantoro dan Dewi, I.G.P. (2016). *Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB dan Upah Minimum Regoinal Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten*. Jurnal Ekonimi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi). Vol 6(1), 18-35. 2016.
- Kolibu, Vekie Adolf Rumat, Daisy S.M. Engka. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhdap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Vol 19, No 3 (2017).
- Mankiw, Gregory. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Mirza, 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan: Vol. 1 (1) (2012).
- Novriansyah, Arif. (2018). *Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*. Gorontalo Development Review. Vol. 1(1), 59-73, 2018.
- Pangkiro, Henny A.K, dkk. 2016. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 01 Tahun 2016.
- Pribadi, Ulung (2015). *Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Provinsi Aceh*. Jurnal Pemerintahan dan Kebudayaan Publik. Vol 2(1), 91-114, 2015
- Putro, Pilipus, (2017). Analisis determinasi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Jurnal Universitas Mulawarman, Samarinda. Volume 13 (2), 2017, 121-126

- Saputra, W.A. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten /Kota Jawa Tengah. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Edisi.6 Jilid 1. Jakarta: Salemba empat.
- Setiawan, I. (2013). *Ekonometrika Ekonomi Teori Dan Terapan*. Salemba Empat. Bandung.
- Sjafrizal. (2012), *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wongdesmiwati, 2009. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*.
- Yuliasih, Fitri. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal.
- Yacoub, Yarlina. 2012. *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan I Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Ekonomi Sosial. Pontianak Universitas Tanjungpura. Pontianak.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Pengambilan Data di Kantor BAPPEDA Aceh



Lampiran 2

Data Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Dana Otonomi Khusus dan Kemiskinan kabupaten/Kota di Aceh 2008-2020

No	Tahun	Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Upah Minimum regional (Rp)	Dana Otonomi Khusus (Rp)	Kemiskinan (%)
1	2008	Kab. Aceh Besar	2,71	1.000.000	98.300.000.000	63,46
2	2009	Kab. Aceh Besar	2,56	1.200.000	93.590.000.000	58,97
3	2010	Kab. Aceh Besar	1,17	1.300.000	90.890.680.684	66,20
4	2011	Kab. Aceh Besar	2,59	1.350.000	96.846.530.789	66,34
5	2012	Kab. Aceh Besar	3,91	1.400.000	118.179.368.304	66,56
6	2013	Kab. Aceh Besar	4,16	1.550.000	137.811.790.756	63,90
7	2014	Kab. Aceh Besar	4,08	1.750.000	126.032.648.587	62,40
8	2015	Kab. Aceh Besar	4,02	1.900.000	125.447.783.438	62,27
9	2016	Kab. Aceh Besar	4,05	2.118.500	120.027.345.386	62,03
10	2017	Kab. Aceh Besar	4,01	2.118.500	145.172.828.135	62,72
11	2018	Kab. Aceh Besar	3,78	2.700.000	120.934.901.304	60,08
12	2019	Kab. Aceh Besar	4,35	2.916.810	106.185.484.936	58,90
13	2020	Kab. Aceh Besar	0,31	3.165.031	94.833.223.328	14,70
14	2008	Kab. Aceh Selatan	6,03	1.000.000	115.930.000.000	38,82
15	2009	Kab. Aceh Selatan	5,29	1.200.000	115.930.000.000	35,41
16	2010	Kab. Aceh Selatan	4,13	1.300.000	119.481.737.962	32,20
17	2011	Kab. Aceh Selatan	4,35	1.350.000	119.349.261.789	32,27
18	2012	Kab. Aceh Selatan	5,49	1.400.000	122.201.007.290	31,45
19	2013	Kab. Aceh Selatan	5,32	1.550.000	180.662.375.651	29,30
20	2014	Kab. Aceh Selatan	4,51	1.750.000	158.151.037.413	28,40
21	2015	Kab. Aceh Selatan	4,23	1.900.000	156.731.647.778	29,61
22	2016	Kab. Aceh Selatan	4,64	2.118.500	154.994.777.928	30,68
23	2017	Kab. Aceh Selatan	3,93	2.118.500	176.920.357.212	32,51
24	2018	Kab. Aceh Selatan	4,53	2.700.000	135.950.816.958	32,82
25	2019	Kab. Aceh Selatan	4,43	2.916.810	122.218.179.195	31,06
26	2020	Kab. Aceh Selatan	-0,05	3.165.031	107.999.879.481	31,02

27	2008	Kab. Aceh Tengah	3,93	1.000.000	114.210.000.000	40,64
28	2009	Kab. Aceh Tengah	4,01	1.200.000	114.210.000.000	38,17
29	2010	Kab. Aceh Tengah	4,20	1.300.000	115.338.384.798	35,30
30	2011	Kab. Aceh Tengah	4,93	1.350.000	119.349.261.789	35,37
31	2012	Kab. Aceh Tengah	4,34	1.400.000	135.798.267.712	34,47
32	2013	Kab. Aceh Tengah	5,44	1.550.000	171.801.124.648	33,60
33	2014	Kab. Aceh Tengah	4,05	1.750.000	151.548.782.608	32,80
34	2015	Kab. Aceh Tengah	4,23	1.900.000	153.029.242.798	34,26
35	2016	Kab. Aceh Tengah	4,59	2.118.500	155.580.425.460	33,16
36	2017	Kab. Aceh Tengah	4,05	2.118.500	166.831.320.459	32,24
37	2018	Kab. Aceh Tengah	4,22	2.700.000	125.488.700.066	32,31
38	2019	Kab. Aceh Tengah	3,51	2.916.810	120.601.436.421	32,78
39	2020	Kab. Aceh Tengah	-1,21	3.165.031	105.626.988.128	32,63
40	2008	Kab. Aceh Tenggara	3,39	1.000.000	102.220.000.000	30,89
41	2009	Kab. Aceh Tenggara	4,68	1.200.000	102.220.000.000	27,87
42	2010	Kab. Aceh Tenggara	4,90	1.300.000	111.850.356.683	30,00
43	2011	Kab. Aceh Tenggara	5,42	1.350.000	119.631.216.398	30,16
44	2012	Kab. Aceh Tenggara	4,61	1.400.000	144.032.456.686	29,41
45	2013	Kab. Aceh Tenggara	4,89	1.550.000	183.285.909.131	27,80
46	2014	Kab. Aceh Tenggara	3,84	1.750.000	162.405.107.409	27,10
47	2015	Kab. Aceh Tenggara	4,03	1.900.000	194.829.969.574	30,14
48	2016	Kab. Aceh Tenggara	4,24	2.118.500	163.800.562.878	29,39
49	2017	Kab. Aceh Tenggara	5,03	2.118.500	175.095.446.154	30,84
50	2018	Kab. Aceh Tenggara	3,26	2.700.000	176.898.377.582	30,20
51	2019	Kab. Aceh Tenggara	4,23	2.916.810	130.061.227.670	28,93
52	2020	Kab. Aceh Tenggara	-0,17	3.165.031	106.152.997.420	21,03
53	2008	Kab. Bireuen	3,20	1.000.000	91.790.000.000	79,09
54	2009	Kab. Bireuen	3,45	1.200.000	91.790.000.000	72,94
55	2010	Kab. Bireuen	3,70	1.300.000	100.114.996.299	76,10
56	2011	Kab. Bireuen	3,80	1.350.000	101.218.489.429	76,26
57	2012	Kab. Bireuen	3,95	1.400.000	124.063.252.755	74,30
58	2013	Kab. Bireuen	4,03	1.550.000	148.549.131.596	73,90
59	2014	Kab. Bireuen	2,15	1.750.000	132.235.242.030	72,20

60	2015	Kab. Bireuen	3,80	1.900.000	126.659.178.409	73,14
61	2016	Kab. Bireuen	4,04	2.118.500	126.203.414.910	70,44
62	2017	Kab. Bireuen	4,23	2.118.500	144.746.630.857	71,54
63	2018	Kab. Bireuen	4,22	2.700.000	119.274.158.548	65,74
64	2019	Kab. Bireuen	5,00	2.916.810	104.606.550.438	63,60
65	2020	Kab. Bireuen	-0,94	3.165.031	109.671.369.591	61,50
66	2008	Kab. Pidie	3,90	1.000.000	93.330.000.000	101,77
67	2009	Kab. Pidie	3,40	1.200.000	93.330.000.000	93,80
68	2010	Kab. Pidie	4,05	1.300.000	112.185.859.190	90,20
69	2011	Kab. Pidie	4,15	1.350.000	118.712.301.061	20,39
70	2012	Kab. Pidie	4,52	1.400.000	134.413.543.284	88,02
71	2013	Kab. Pidie	4,24	1.550.000	179.071.888.941	85,80
72	2014	Kab. Pidie	4,03	1.750.000	160.629.520.329	83,70
73	2015	Kab. Pidie	4,82	1.900.000	154.825.046.044	88,22
74	2016	Kab. Pidie	3,88	2.118.500	152.724.360.707	90,16
75	2017	Kab. Pidie	4,42	2.118.500	174.184.090.318	92,35
76	2018	Kab. Pidie	4,16	2.700.000	139.948.593.645	89,35
77	2019	Kab. Pidie	4,43	2.916.810	152.919.846.547	89,29
78	2020	Kab. Pidie	-0,14	3.165.031	118.296.013.637	35,90
79	2008	Kab. Simeuleu	3,03	1.000.000	89.920.000.000	20,57
80	2009	Kab. Simeuleu	3,50	1.200.000	89.920.000.000	19,11
81	2010	Kab. Simeuleu	3,90	1.300.000	86.781.751.548	18,90
82	2011	Kab. Simeuleu	4,08	1.350.000	92.611.954.618	19,04
83	2012	Kab. Simeuleu	5,16	1.400.000	106.151.786.712	18,50
84	2013	Kab. Simeuleu	4,69	1.550.000	123.803.304.936	17,80
85	2014	Kab. Simeuleu	4,33	1.750.000	105.326.444.150	17,50
86	2015	Kab. Simeuleu	4,31	1.900.000	108.490.033.837	18,12
87	2016	Kab. Simeuleu	4,55	2.118.500	106.477.927.991	17,93
88	2017	Kab. Simeuleu	4,42	2.118.500	129.993.185.554	18,40
89	2018	Kab. Simeuleu	4,23	2.700.000	108.627.440.992	18,22
90	2019	Kab. Simeuleu	4,60	2.916.810	98.370.423.520	17,67
91	2020	Kab. Simeuleu	0,15	3.165.031	83.198.500.486	15,03
92	2008	Kota Banda Aceh	6,03	1.000.000	52.080.000.000	19,91

93	2009	Kota Banda Aceh	6,30	1.200.000	52.080.000.000	17,27
94	2010	Kota Banda Aceh	5,98	1.300.000	59.428.775.408	20,80
95	2011	Kota Banda Aceh	7,02	1.350.000	62.042.094.276	20,84
96	2012	Kota Banda Aceh	7,12	1.400.000	71.225.644.829	20,25
97	2013	Kota Banda Aceh	7,09	1.550.000	85.552.246.729	19,40
98	2014	Kota Banda Aceh	7,96	1.750.000	112.551.355.724	19,40
99	2015	Kota Banda Aceh	7,35	1.900.000	117.110.295.941	19,30
100	2016	Kota Banda Aceh	7,37	2.118.500	117.548.585.309	18,80
101	2017	Kota Banda Aceh	9,17	2.118.500	128.838.661.682	19,23
102	2018	Kota Banda Aceh	4,02	2.700.000	80.759.025.895	19,13
103	2019	Kota Banda Aceh	9,82	2.916.810	74.887.433.703	19,42
104	2020	Kota Banda Aceh	9,59	3.165.031	112.174.533.540	15,20
105	2008	Kota Sabang	3,10	1.000.000	45.690.000.000	7,14
106	2009	Kota Sabang	3,30	1.200.000	45.690.000.000	6,54
107	2010	Kota Sabang	3,73	1.300.000	47.333.129.085	6,60
108	2011	Kota Sabang	3,84	1.350.000	49.197.705.502	6,71
109	2012	Kota Sabang	4,18	1.400.000	57.420.816.610	6,52
110	2013	Kota Sabang	4,23	1.550.000	68.856.877.380	5,90
111	2014	Kota Sabang	4,06	1.750.000	60.213.985.770	5,60
112	2015	Kota Sabang	4,33	1.900.000	62.331.350.724	5,86
113	2016	Kota Sabang	4,85	2.118.500	61.348.336.627	5,81
114	2017	Kota Sabang	6,07	2.118.500	74.736.894.410	5,98
115	2018	Kota Sabang	5,87	2.700.000	78.118.798.574	5,62
116	2019	Kota Sabang	5,82	2.916.810	73.928.138.452	5,43
117	2020	Kota Sabang	-1,05	3.165.031	66.067.662.980	4,39
118	2008	Kota Langsa	3,14	1.000.000	62.260.000.000	23,96
119	2009	Kota Langsa	3,21	1.200.000	62.260.000.000	21,34
120	2010	Kota Langsa	3,27	1.300.000	60.514.791.364	22,40
121	2011	Kota Langsa	4,34	1.350.000	63.137.675.665	22,45

12 2	2012	Kota Langsa	4,72	1.400.000	76.623.404.861	21,81
12 3	2013	Kota Langsa	4,57	1.550.000	90.176.414.847	20,30
12 4	2014	Kota Langsa	4,24	1.750.000	81.666.286.361	19,80
12 5	2015	Kota Langsa	4,40	1.900.000	81.926.615.347	19,22
12 6	2016	Kota Langsa	4,49	2.118.500	80.680.341.059	18,63
12 7	2017	Kota Langsa	4,43	2.118.500	92.168.291.565	19,20
12 8	2018	Kota Langsa	4,33	2.700.000	87.281.275.681	18,73
12 9	2019	Kota Langsa	4,39	2.916.810	78.040.783.301	18,62
13 0	2020	Kota Langsa	-1,06	3.165.031	77.293.615.854	14,04
13 1	2008	Kab. Gayo Lues	3,12	1.000.000	151.300.000.000	18,89
13 2	2009	Kab. Gayo Lues	3,39	1.200.000	151.300.000.000	17,09
13 3	2010	Kab. Gayo Lues	3,90	1.300.000	144.551.971.679	19,00
13 4	2011	Kab. Gayo Lues	4,55	1.350.000	147.604.949.042	19,14
13 5	2012	Kab. Gayo Lues	5,43	1.400.000	168.055.431.561	18,60
13 6	2013	Kab. Gayo Lues	3,86	1.550.000	187.734.858.157	19,00
13 7	2014	Kab. Gayo Lues	3,87	1.750.000	195.021.178.231	18,60
13 8	2015	Kab. Gayo Lues	3,93	1.900.000	200.855.367.107	19,32
13 9	2016	Kab. Gayo Lues	4,13	2.118.500	198.087.218.142	19,48
14 0	2017	Kab. Gayo Lues	4,70	2.118.500	212.139.540.027	19,91
14 1	2018	Kab. Gayo Lues	1,28	2.700.000	162.056.797.794	19,09
14 2	2019	Kab. Gayo Lues	1,26	2.916.810	161.929.893.441	18,63
14 3	2020	Kab. Gayo Lues	0,88	3.165.031	104.452.731.190	15,89
14 4	2008	Kab. Aceh Barat Daya	2,19	1.000.000	78.300.000.000	27,43
14 5	2009	Kab. Aceh Barat Daya	1,81	1.200.000	78.300.000.000	25,00
14 6	2010	Kab. Aceh Barat Daya	3,24	1.300.000	85.673.554.517	25,20
14 7	2011	Kab. Aceh Barat Daya	2,59	1.350.000	94.471.359.985	25,25
14 8	2012	Kab. Aceh Barat Daya	1,91	1.400.000	107.873.209.046	24,64

14 9	2013	Kab. Aceh Barat Daya	2,33	1.550.000	128.140.347.483	25,70
15 0	2014	Kab. Aceh Barat Daya	1,10	1.750.000	111.022.420.534	25,00
15 1	2015	Kab. Aceh Barat Daya	3,34	1.900.000	111.439.098.930	25,93
15 2	2016	Kab. Aceh Barat Daya	4,56	2.118.500	111.681.805.860	25,73
15 3	2017	Kab. Aceh Barat Daya	4,46	2.118.500	126.398.383.430	26,57
15 4	2018	Kab. Aceh Barat Daya	4,61	2.700.000	108.009.555.427	25,23
15 5	2019	Kab. Aceh Barat Daya	4,75	2.916.810	104.624.275.217	24,36
15 6	2020	Kab. Aceh Barat Daya	-0,52	3.165.031	87.385.146.813	25,37
15 7	2008	Kab. Aceh Jaya	0,00	1.000.000	110.060.000.000	17,24
15 8	2009	Kab. Aceh Jaya	0,00	1.200.000	110.060.000.000	17,13
15 9	2010	Kab. Aceh Jaya	0,00	1.300.000	118.117.558.841	15,60
16 0	2011	Kab. Aceh Jaya	4,16	1.350.000	117.762.405.634	15,63
16 1	2012	Kab. Aceh Jaya	3,98	1.400.000	138.679.171.139	15,19
16 2	2013	Kab. Aceh Jaya	3,20	1.550.000	175.261.062.131	14,60
16 3	2014	Kab. Aceh Jaya	3,69	1.750.000	152.474.420.522	14,20
16 4	2015	Kab. Aceh Jaya	3,71	1.900.000	158.425.915.563	13,85
16 5	2016	Kab. Aceh Jaya	3,89	2.118.500	155.557.222.303	13,10
16 6	2017	Kab. Aceh Jaya	4,00	2.118.500	163.831.996.389	13,23
16 7	2018	Kab. Aceh Jaya	4,04	2.700.000	129.907.836.447	12,85
16 8	2019	Kab. Aceh Jaya	3,75	2.916.810	125.590.719.315	12,35
16 9	2020	Kab. Aceh Jaya	-0,62	3.165.031	93.320.203.567	15,47
17 0	2008	Kab. Aceh Tamiang	1,95	1.000.000	94.270.000.000	50,82
17 1	2009	Kab. Aceh Tamiang	1,15	1.200.000	94.270.000.000	45,29
17 2	2010	Kab. Aceh Tamiang	2,01	1.300.000	99.218.010.668	45,20
17 3	2011	Kab. Aceh Tamiang	1,53	1.350.000	91.571.509.786	45,30
17 4	2012	Kab. Aceh Tamiang	3,96	1.400.000	107.646.469.694	44,11
17 5	2013	Kab. Aceh Tamiang	5,04	1.550.000	146.646.469.694	40,80

17 6	2014	Kab. Aceh Tamiang	2,40	1.750.000	133.953.744.076	39,90
17 7	2015	Kab. Aceh Tamiang	2,63	1.900.000	126.829.640.443	40,38
17 8	2016	Kab. Aceh Tamiang	2,83	2.118.500	133.123.671.881	40,88
17 9	2017	Kab. Aceh Tamiang	4,00	2.118.500	149.383.161.807	42,01
18 0	2018	Kab. Aceh Tamiang	4,25	2.700.000	119.614.281.198	41,21
18 1	2019	Kab. Aceh Tamiang	4,55	2.916.810	112.232.715.049	39,35
18 2	2020	Kab. Aceh Tamiang	0,42	3.165.031	100.027.802.195	40,41
18 3	2008	Kab. Bener Meriah	4,01	1.000.000	77.390.000.000	31,28
18 4	2009	Kab. Bener Meriah	4,40	1.200.000	77.390.000.000	28,58
18 5	2010	Kab. Bener Meriah	4,31	1.300.000	80.388.355.393	32,10
18 6	2011	Kab. Bener Meriah	4,47	1.350.000	80.658.387.499	32,17
18 7	2012	Kab. Bener Meriah	5,23	1.400.000	95.558.173.264	31,35
18 8	2013	Kab. Bener Meriah	5,39	1.550.000	125.676.693.791	30,90
18 9	2014	Kab. Bener Meriah	4,45	1.750.000	109.243.670.794	30,20
19 0	2015	Kab. Bener Meriah	4,82	1.900.000	111.916.310.575	29,31
19 1	2016	Kab. Bener Meriah	4,43	2.118.500	111.031.402.802	20,82
19 2	2017	Kab. Bener Meriah	4,09	2.118.500	127.365.365.951	29,99
19 3	2018	Kab. Bener Meriah	4,16	2.700.000	108.724.375.091	29,08
19 4	2019	Kab. Bener Meriah	4,32	2.916.810	102.535.257.609	28,45
19 5	2020	Kab. Bener Meriah	0,26	3.165.031	86.327.851.222	30,31
19 6	2008	Kab. Pidie Jaya	3,50	1.000.000	55.090.000.000	37,70
19 7	2009	Kab. Pidie Jaya	3,71	1.200.000	55.090.000.000	35,60
19 8	2010	Kab. Pidie Jaya	3,93	1.300.000	70.535.242.951	34,70
19 9	2011	Kab. Pidie Jaya	4,13	1.350.000	72.799.090.971	34,77
20 0	2012	Kab. Pidie Jaya	4,33	1.400.000	83.710.613.753	33,89
20 1	2013	Kab. Pidie Jaya	4,55	1.550.000	106.853.327.339	32,60
20 2	2014	Kab. Pidie Jaya	3,63	1.750.000	94.216.152.766	31,90

20 3	2015	Kab. Pidie Jaya	4,84	1.900.000	96.640.402.805	31,81
20 4	2016	Kab. Pidie Jaya	8,70	2.118.500	94.651.839.282	31,94
20 5	2017	Kab. Pidie Jaya	5,80	2.118.500	98.263.717.918	33,60
20 6	2018	Kab. Pidie Jaya	4,63	2.700.000	94.243.412.907	31,72
20 7	2019	Kab. Pidie Jaya	4,08	2.916.810	88.824.793.984	30,97
20 8	2020	Kab. Pidie Jaya	-1,11	3.165.031	80.850.532.828	30,99
20 9	2008	Kab. Subulussalam	4,11	1.000.000	63.850.000.000	17,73
21 0	2009	Kab. Subulussalam	4,15	1.200.000	63.850.000.000	16,75
21 1	2010	Kab. Subulussalam	4,31	1.300.000	78.883.668.613	16,40
21 2	2011	Kota Subulussalam	4,33	1.350.000	81.412.515.989	16,53
21 3	2012	Kota Subulussalam	4,68	1.400.000	90.702.375.615	16,07
21 4	2013	Kota Subulussalam	4,96	1.550.000	115.252.311.485	15,00
21 5	2014	Kota Subulussalam	5,11	1.750.000	104.797.081.782	14,60
21 6	2015	Kab. Subulussalam	4,42	1.900.000	104.164.275.991	15,25
21 7	2016	Kab. Subulussalam	4,69	2.118.500	105.713.985.920	14,99
21 8	2017	Kota Subulussalam	4,93	2.118.500	116.403.563.705	15,44
21 9	2018	Kota Subulussalam	4,42	2.700.000	10.694.632.531	14,78
22 0	2019	Kota Subulussalam	4,42	2.916.810	97.391.453.702	14,56
22 1	2020	Kota Subulussalam	1,97	3.165.031	78.740.538.525	14,72
22 2	2008	Kab. Aceh Barat	1,19	1.000.000	93.590.000.000	43,69
22 3	2009	Kab. Aceh Barat	1,93	1.200.000	93.590.000.000	40,39
22 4	2010	Kab. Aceh Barat	2,20	1.300.000	90.890.680.684	42,40
22 5	2011	Kab. Aceh Barat	2,40	1.350.000	96.846.530.789	42,49
22 6	2012	Kab. Aceh Barat	0,56	1.400.000	118.179.368.304	41,38
22 7	2013	Kab. Aceh Barat	3,90	1.550.000	137.811.790.756	44,30
22 8	2014	Kab. Aceh Barat	3,36	1.750.000	126.032.648.587	43,90
22 9	2015	Kab. Aceh Barat	4,58	1.900.000	125.447.783.438	41,36

23 0	2016	Kab. Aceh Barat	2,92	2.118.500	120.027.345.386	40,11
23 1	2017	Kab. Aceh Barat	13,23	2.118.500	145.172.828.135	40,72
23 2	2018	Kab. Aceh Barat	10,14	2.700.000	120.934.901.304	39,56
23 3	2019	Kab. Aceh Barat	4,99	2.916.810	106.185.484.936	39,29
23 4	2020	Kab. Aceh Barat	1,87	3.165.031	94.833.223.328	40,41
23 5	2008	Kab. Aceh Singkil	2,90	1.000.000	89.390.000.000	22,24
23 6	2009	Kab. Aceh Singkil	3,35	1.200.000	89.390.000.000	20,29
23 7	2010	Kab. Aceh Singkil	3,89	1.300.000	97.756.143.949	10,90
23 8	2011	Kab. Aceh Singkil	4,30	1.350.000	102.341.111.565	19,94
23 9	2012	Kab. Aceh Singkil	4,18	1.400.000	116.767.957.062	19,38
24 0	2013	Kab. Aceh Singkil	4,49	1.550.000	130.744.005.985	20,70
24 1	2014	Kab. Aceh Singkil	3,72	1.750.000	113.747.315.554	20,00
24 2	2015	Kab. Aceh Singkil	3,72	1.900.000	116.337.845.137	24,84
24 3	2016	Kab. Aceh Singkil	4,16	2.118.500	116.375.954.770	25,09
24 4	2017	Kab. Aceh Singkil	3,92	2.118.500	118.138.819.332	26,27
24 5	2018	Kab. Aceh Singkil	3,98	2.700.000	110.202.509.182	25,74
24 6	2019	Kab. Aceh Singkil	3,99	2.916.810	110.346.584.240	25,66
24 7	2020	Kab. Aceh Singkil	-1,16	3.165.031	84.815.780.821	25,71
24 8	2008	Kab. Aceh Timur	1,16	1.000.000	157.520.000.000	76,22
24 9	2009	Kab. Aceh Timur	1,60	1.200.000	157.520.000.000	68,30
25 0	2010	Kab. Aceh Timur	2,37	1.300.000	161.031.019.908	66,50
25 1	2011	Kab. Aceh Timur	2,60	1.350.000	168.908.398.828	66,74
25 2	2012	Kab. Aceh Timur	2,66	1.400.000	203.315.357.760	64,95
25 3	2013	Kab. Aceh Timur	1,08	1.550.000	229.572.089.071	64,40
25 4	2014	Kab. Aceh Timur	-0,51	1.750.000	204.540.812.409	63,00
25 5	2015	Kab. Aceh Timur	-5,98	1.900.000	203.304.448.098	63,48
25 6	2016	Kab. Aceh Timur	-1,16	2.118.500	204.299.783.417	61,63

25 7	2017	Kab. Aceh Timur	4,34	2.118.500	252.512.203.750	63,67
25 8	2018	Kab. Aceh Timur	4,20	2.700.000	190.863.331.706	61,64
25 9	2019	Kab. Aceh Timur	4,42	2.916.810	210.826.674.638	62,79
26 0	2020	Kab. Aceh Timur	1,79	3.165.031	131.502.316.016	63,02
26 1	2008	Kab. Aceh Utara	3,09	1.000.000	100.710.000.000	135,70
26 2	2009	Kab. Aceh Utara	3,59	1.200.000	100.710.000.000	126,59
26 3	2010	Kab. Aceh Utara	3,78	1.300.000	127.648.390.364	124,40
26 4	2011	Kab. Aceh Utara	3,88	1.350.000	123.034.524.324	124,66
26 5	2012	Kab. Aceh Utara	1,59	1.400.000	138.766.784.896	121,42
26 6	2013	Kab. Aceh Utara	-1,74	1.550.000	177.233.160.034	115,40
26 7	2014	Kab. Aceh Utara	-3,59	1.750.000	136.328.668.055	112,70
26 8	2015	Kab. Aceh Utara	-11,69	1.900.000	132.384.928.052	111,44
26 9	2016	Kab. Aceh Utara	0,07	2.118.500	129.524.653.383	115,05
27 0	2017	Kab. Aceh Utara	2,30	2.118.500	178.692.371.265	118,74
27 1	2018	Kab. Aceh Utara	4,77	2.700.000	130.523.243.754	111,27
27 2	2019	Kab. Aceh Utara	3,48	2.916.810	124.623.032.105	107,34
27 3	2020	Kab. Aceh Utara	0,97	3.165.031	128.240.143.852	108,42
27 4	2008	Kota Lhokseumawe	-1,34	1.000.000	61.930.000.000	23,94
27 5	2009	Kota Lhokseumawe	1,01	1.200.000	61.930.000.000	22,53
27 6	2010	Kota Lhokseumawe	0,90	1.300.000	57.477.087.601	24,00
27 7	2011	Kota Lhokseumawe	-2,39	1.350.000	61.483.395.522	24,15
27 8	2012	Kota Lhokseumawe	1,20	1.400.000	71.691.684.220	23,56
27 9	2013	Kota Lhokseumawe	-1,14	1.550.000	84.158.429.359	23,00
28 0	2014	Kota Lhokseumawe	-7,39	1.750.000	73.732.980.017	22,50
28 1	2015	Kota Lhokseumawe	-20,34	1.900.000	73.902.055.739	23,15
28 2	2016	Kota Lhokseumawe	-1,52	2.118.500	73.736.159.755	23,28
28 3	2017	Kota Lhokseumawe	2,19	2.118.500	87.941.476.679	24,40

28 4	2018	Kota Lhokseumawe	3,78	2.700.000	86.605.166.240	23,88
28 5	2019	Kota Lhokseumawe	3,98	2.916.810	79.402.072.351	23,05
28 6	2020	Kota Lhokseumawe	-1,45	3.165.031	77.603.295.272	24,10
28 7	2008	Kab. Nagan Raya	-0,35	1.000.000	118.880.000.000	33,21
28 8	2009	Kab. Nagan Raya	2,11	1.200.000	118.880.000.000	30,86
28 9	2010	Kab. Nagan Raya	2,01	1.300.000	104.310.101.317	33,40
29 0	2011	Kab. Nagan Raya	2,62	1.350.000	110.914.506.152	33,57
29 1	2012	Kab. Nagan Raya	3,70	1.400.000	136.282.859.178	32,72
29 2	2013	Kab. Nagan Raya	3,40	1.550.000	146.705.576.546	32,70
29 3	2014	Kab. Nagan Raya	3,42	1.750.000	145.833.596.496	31,90
29 4	2015	Kab. Nagan Raya	4,17	1.900.000	145.845.274.513	31,32
29 5	2016	Kab. Nagan Raya	4,05	2.118.500	140.100.960.736	30,31
29 6	2017	Kab. Nagan Raya	3,95	2.118.500	183.468.756.928	31,06
29 7	2018	Kab. Nagan Raya	4,29	2.700.000	163.927.836.447	31,06
29 8	2019	Kab. Nagan Raya	6,77	2.916.810	128.955.146.560	29,93
29 9	2020	Kab. Nagan Raya	3,54	3.165.031	97.891.007.667	29,98



Lampiran 3

Data rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Dana Otonomi Khusus dan Kemiskinan kabupaten/Kota di Aceh 2008-2020

No.	Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Upah Minimum regional	Dana Otonomi Khusus	Kemiskinan
1	Kab. Aceh Besar	3,67	1.959.142	122.321.737.357	62,1
2	Kab. Aceh Selatan	4,37	1.882.219	137.424.698.358	31,97
3	Kab. Aceh Tengah	3,87	1.882.219	134.570.302.684	34,44
4	Kab. Aceh Tenggara	4,03	1.882.219	144.037.202.122	28,75
5	Kab. Bireuen	4,03	1.882.219	144.037.202.122	28,75
6	Kab. Pidie	3,84	1.882.219	137.274.697.208	80,69
7	Kab. Simeuleu	3,92	1.882.219	102.282.519.565	18,21
8	Kota Banda Aceh	7,29	1.882.219	86.636.819.464	19,15
9	Kota Sabang	4,03	1.882.219	60.841.053.547	6,01
10	Kota Langsa	3,73	1.882.219	76.463.807.377	20,04
11	Kab. Gayo Lues	3,41	1.882.219	168.083.841.259	18,66
12	Kab. Aceh Barat Daya	2,8	1.882.219	102.563.012.096	25,49
13	Kab. Aceh Jaya	2,6	1.882.219	134.542.193.219	14,65
14	Kab. Aceh Tamiang	2,82	1.882.219	116.060.575.115	42,74
15	Kab. Bener Meriah	4,18	1.882.219	99.554.295.692	29,58
16	Kab. Pidie Jaya	4,21	1.882.219	83.982.240.577	33,25
17	Kota Subulussalam	4,35	1.882.219	85.527.415.681	15,6
18	Kab. Aceh Barat	4,1	1.882.219	113.041.737.357	41,54
19	Kab. Aceh Singkil	3,5	1.882.219	107.411.848.277	22,06
20	Kab. Aceh Timur	1,43	1.882.219	190.439.725.815	65,1
21	Kab. Aceh Utara	0,81	1.882.219	132.955.376.930	117,93
22	Kota Lhokseumawe	-1,73	1.882.219	73.199.523.289	23,5
23	Kab. Nagan Raya	3,36	1.882.219	133.999.663.272	31,69

Lampiran 4

HASIL MODEL COMMON EFFECT

Dependent Variable: PERTUMBUHAN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/14/22 Time: 06:41

Sample: 2008 2020

Periods included: 13

Cross-sections included: 23

Total panel (unbalanced) observations: 296

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UMR	-3.35E-07	2.39E-07	-1.401847	0.1620
OTSUS	8.78E-12	4.48E-12	1.960674	0.0509
KEMISKINAN	-0.022422	0.006357	-3.527352	0.0005
C	3.861071	0.657480	5.872527	0.0000
R-squared	0.045568	Mean dependent var		3.405169
Adjusted R-squared	0.035762	S.D. dependent var		2.745156
S.E. of regression	2.695622	Akaike info criterion		4.834556
Sum squared resid	2121.782	Schwarz criterion		4.884426
Log likelihood	-711.5144	Hannan-Quinn criter.		4.854523
F-statistic	4.647070	Durbin-Watson stat		0.870015
Prob(F-statistic)	0.003436			

A R - R A N I R Y

Lampiran 5

HASIL MODEL FIX EFFECT

Dependent Variable: PERTUMBUHAN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/14/22 Time: 06:45

Sample: 2008 2020

Periods included: 13

Cross-sections included: 23

Total panel (unbalanced) observations: 296

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UMR	-2.38E-07	2.14E-07	-1.099983	0.2762
OTSUS	2.51E-12	6.22E-12	4.005438	0.0001
PE	0.042339	0.102716	1.976784	0.0498
C	-0.601742	1.212372	-0.498753	0.0543

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.660725	Mean dependent var	3.765321
Adjusted R-squared	0.621985	S.D. dependent var	2.565321
S.E. of regression	2.542760	Akaike info criterion	4.665432
Sum squared resid	1333.908	Schwarz criterion	4.887543
Log likelihood	-6873219	Hannan-Quinn criter.	4.987531
F-statistic	7.110120	Durbin-Watson stat	1.432189
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6

HASIL MODEL RANDOM EFFECT

Dependent Variable: PERTUMBUHAN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/14/22 Time: 06:47

Sample: 2008 2020

Periods included: 13

Cross-sections included: 23

Total panel (unbalanced) observations: 296

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UMR	-3.44E-07	2.03E-07	-1.696050	0.0909
OTSUS	1.85E-11	5.51E-12	3.357977	0.0009
KEMISKINAN	-0.010735	0.011636	-0.922519	0.3570
C	2.317874	0.856771	2.705361	0.0072
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.513245	0.3122
Idiosyncratic random			2.245863	0.6878
Weighted Statistics				
R-squared	0.040208	Mean dependent var		1.301192
Adjusted R-squared	0.030347	S.D. dependent var		2.313170
S.E. of regression	2.277665	Sum squared resid		1514.826
F-statistic	4.077565	Durbin-Watson stat		1.187508
Prob(F-statistic)	0.007370			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.005841	Mean dependent var		3.405169
Sum squared resid	2210.101	Durbin-Watson stat		0.813930

Lampiran 7

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.848325	(22,270)	0.0000
Cross-section Chi-square	131.249497	22	0.0000

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.328343	3	0.0101